

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN LEBONG 2016



***BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LEBONG***

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN LEBONG

2016



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN LEBONG 2016

ISBN	:	978-602-6853-86-8
Nomor Publikasi	:	17070.1720
Katalog BPS	:	4102004.1707
Ukuran Buku	:	17,5 cm x 24 cm
Jumlah Halaman	:	xxvii +99 halaman
Naskah	:	BPS Kabupaten Lebong
Gambar Kulit	:	BPS Kabupaten Lebong
Diterbitkan oleh	:	© BPS Kabupaten Lebong
Dicetak Oleh	:	Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN LEBONG 2016

Tim Penyusun :

Penanggungjawab : Ir. Sriwiyana Teguh Ananto, M.Si.

Editor : Galih Wibisono, SST

Penyusun Naskah : Ria Dwi Agustin, SST

Desain Cover : Ria Dwi Agustin, SST

<https://lebongkab.bps.go.id>



KATA PENGANTAR

Penyebarluasan informasi statistik merupakan salah satu kegiatan Badan Pusat Statistik (BPS) agar pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui perkembangan keadaan daerahnya.

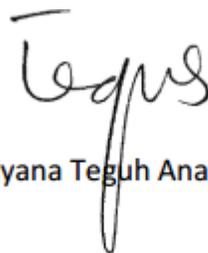
Publikasi **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lebong 2016** merupakan salah satu produk BPS Kabupaten Lebong dalam rangka melengkapi ketersediaan informasi statistik bagi pemerintah dan masyarakat yang menyajikan data tentang perkembangan kesejahteraan rakyat Kabupaten Lebong yang dikelompokkan dalam bidang: kependudukan, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, pola konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, ketenagakerjaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perumahan dan lingkungan.

Data yang disajikan umumnya data primer yang bersumber dari hasil sensus dan survei BPS serta dilengkapi data sekunder dari dinas/instansi yang ruang lingkup kerjanya terkait dengan bidang kesejahteraan rakyat. Dalam analisisnya, publikasi ini dilengkapi dengan grafik-grafik sederhana untuk memudahkan pengguna data memahami perkembangan indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Lebong dari tahun ke tahun.

Saran dan kritik yang konstruktif dari konsumen data untuk pengembangan publikasi ini pada masa yang akan datang sangat diperlukan dan kepada semua pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran hingga terbitnya publikasi ini, disampaikan ucapan terimakasih.

Lebong, November 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong
Kepala,



Ir Sriwiyana Teguh Ananto, M.Si.

Sekilas Tentang BPS

Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS adalah lembaga vertikal dan memiliki perwakilan di setiap ibukota Propinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan di setiap Kecamatan paling tidak terdapat seorang Koordinator Statistik yang bertanggung jawab dalam pengumpulan data statistik di wilayah kecamatan.

Menurut UU tentang Statistik, Statistik dikelompokkan menjadi 3 jenis :

1. **Statistik Dasar**, adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.
2. **Statistik Sektoral**, adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
3. **Statistik Khusus**, adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.

Data BPS

BPS sebagai badan penyedia informasi statistik untuk keperluan pemerintah, swasta dan masyarakat, berusaha memenuhi kebutuhan data tersebut. Data yang tersedia di BPS meliputi data pertanian, komunikasi, pengeluaran dan konsumsi, konstruksi, energi, perdagangan luar negeri, pertambangan, keuangan, penduduk, pariwisata, transportasi, pendapatan dan indeks harga konsumen.

Layanan BPS

BPS menghasilkan keragaman data statistik baik sosial maupun ekonomi, yang dimanfaatkan baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat umum. Informasi dikemas baik dalam bentuk media cetak seperti buku, maupun media elektronik seperti publikasi elektronik dan internet. Untuk memenuhi kebutuhan statistik yang amat beragam, BPS dapat menyediakan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna data.

Selain itu, beberapa ragam layanan lainnya yang dapat diberikan antara lain:

1. Perencanaan survei, *sampling* maupun perancangan kuesioner
2. Pelatihan statistik dan komputer
3. Konsultasi statistik

Kontak BPS

Produk BPS Kabupaten Lebong dapat diunduh melalui website : <http://lebongkab.bps.go.id/>.

DAFTAR ISI

	Uraian	Hal
	Pengantar Kepala BPS Kabupaten Lebong	v
	Sekilas Tentang Badan Pusat Statistik	Vi
	Daftar Isi	viii
	Daftar Tabel	x
	Daftar Gambar	xi
	Penjelasan Teknis	xiv
	Ringkasan Eksekutif	xxv
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	KEPENDUDUKAN	5
	2.1. Persebaran dan Laju Pertumbuhan Penduduk	6
	2.2. Kepadatan Penduduk	9
	2.3. Rasio Jenis Kelamin	11
	2.4. Komposisi Umur Penduduk	12
	2.5. Keluarga Berencana	15
BAB III	PENDIDIKAN	19
	3.1. Tingkat pendidikan	20
	3.2. Partisipasi Sekolah	22
	3.3. Fasilitas Pendidikan	27
BAB IV	KESEHATAN	29
	4.1. Angka Harapan Hidup	29
	4.2. Status Kesehatan	31
	4.3. Kesehatan Balita	35

BAB V	SOSIAL BUDAYA	41
	5.1. Ibadah Haji	41
	5.2. Teknologi Komunikasi dan Informasi	42
BAB VI	POLA KONSUMSI DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA	45
	6.1. Penduduk Miskin	46
	6.3. Pola Konsumsi Rumah Tangga	48
BAB VII	KETENAGAKERJAAN	51
	7.1. Angkatan Kerja	51
	7.2. Penduduk yang Bekerja	53
	7.3. Tingkat Pengangguran Terbuka	55
BAB VIII	KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	57
	8.1. Peristiwa Kejahatan	57
BAB IX	PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	59
	9.1. Status Penguasaan Tempat Tinggal	59
	9.2. Kualitas dan Fasilitas Rumah dan Tempat Tinggal	61
BAB X	PENUTUP	67
LAMPIRAN		71

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal
2.1	Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Lebong, 2016	13
3.1	Persentase Penduduk 10 tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Ditamatkan di Kabupaten Lebong, 2016	22
3.2	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong, 2016	23
3.3	Angka Partisipasi Kasar Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lebong, 2016	25
3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong, 2016	26
3.5	Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Sekolah di Kabupaten Lebong, 2013/2014-2016/2017	28
4.1	Persentase Penduduk yang Menderita Sakit di Kabupaten Lebong, 2016	32
8.1	Banyaknya Peristiwa Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Kabupaten Lebong, 2014-2016	58
9.1	Persentase Rumah dan Tempat Tinggal Menurut Jenis Lantai, Atap, dan Dinding di Kabupaten Lebong, 2016	62

Daftar Gambar

Gambar	Uraian	Hal
2.1	Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Lebong Menurut Kecamatan, 2016	7
2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lebong dan Provinsi Bengkulu, 2012-2016	8
2.3	Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebong Menurut Kecamatan, 2016 (Jiwa/km ²)	10
2.4	Rasio jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong, 2016	11
2.5	Piramida Penduduk Kabupaten Lebong, 2016	14
2.6	Persentase Penduduk Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Pernah Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Dipakai di Kabupaten Lebong, 2016	17
2.7	Persentase Penduduk Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Tetapi Tidak Ber-KB Menurut Alasan Utama Tidak Menggunakan Alat/Cara KB di Kabupaten Lebong, 2016	18
4.1	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lebong, 2010-2016	30
4.2	Persentase Penduduk yang Sakit Tetapi Tidak Berobat Jalan Sebulan Terakhir Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Lebong, 2016	33
4.3	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Lebong, 2016	34
4.4	Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki Penduduk Kabupaten Lebong, 2016	35

4.5	Persentase Kelahiran Bayi Menurut Penolong Persalinan Terakhir di Kabupaten Lebong, 2016	37
4.6	Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi di Kabupaten Lebong, 2016	38
5.1	Jumlah Calon Jamaah yang Diberangkatkan ke Tanah Suci Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong, 2016	41
5.2	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Alat yang Digunakan di Kabupaten Lebong, 2016	43
5.3	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tempat Mengakses Internet di Kabupaten Lebong, 2016	44
6.1	Penduduk Miskin Kabupaten Lebong 2015-2016 (jiwa)	47
6.2	Garis Kemiskinan Kabupaten Lebong 2015-2016 (000 Rp/kapita/bulan)	47
6.3	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Lebong, 2016	49
6.4	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Lebong, 2016	50
7.1	TPAK Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Lebong, 2013-2015	52
7.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha di Kabupaten Lebong, 2015	54
7.3	TPT Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong, 2015	56

9.1	Persentase Rumahtangga Menurut Status Penguasaan Rumah/Tempat Tinggal yang Didiami di Kabupaten Lebong, 2016	60
9.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Lebong, 2016	63
9.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Lebong, 2016	64
9.4	Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Lebong, 2016	65

Penjelasan Teknis Indikator Kesejahteraan Kabupaten Lebong 2016

Konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini adalah yang telah baku digunakan di BPS RI dalam kegiatan Sensus Penduduk, Susenas, dan Sakernas. Beberapa istilah teknis yang digunakan dalam publikasi ini

1. Statistik Kependudukan

- Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
- Kepala rumah tangga (krt) adalah seseorang dari sekelompok art yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga, atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai krt
- Anggota rumah tangga (art) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga (krt, suami/istri, anak, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili lain, pembantu rumah tangga atau art lainnya.
- Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun yang terakhir. Perhitungan umur didasarkan pada kalender Masehi.
- Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi.

-
- Rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka dinyatakan sebagai persentase dari penduduk pada tahun tertentu (dasar).
 - Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Dinyatakan dalam bentuk banyaknya penduduk laki-laki untuk seratus penduduk perempuan.
 - Kawin adalah seseorang mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah.
 - Cerai hidup adalah seseorang yang telah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi.
 - Cerai mati adalah seseorang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.
 - Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif (umur 15-64 tahun).
 - *Child Dependency Ratio* adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak

produktif berusia dibawah 15 tahun dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif (umur 15-64 tahun).

- *Old Dependency Ratio* adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif pada usia diatas 64 tahun dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif (umur 15-64 tahun).
- Metode Kontrasepsi adalah cara/alat kontrasepsi yang dipakai untuk mencegah kehamilan.
- Peserta Keluarga Berencana (Akseptor) adalah orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi.
- Peserta Keluarga Berencana (Akseptor) Baru adalah orang yang baru pertama kali memakai/mempergunakan metode kontrasepsi dan akseptor sesudah persalinan/keguguran
- Peserta Keluarga Berencana (Akseptor) Aktif adalah orang yang saat ini memakai metode kontrasepsi untuk penjarangan kehamilan
- Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami isteri dimana istrinya berumur 10-45 tahun.
- Klinik Keluarga Berencana (KB) adalah suatu tempat atau fasilitas untuk memperoleh pelayanan medis KB dengan cara-cara kontrasepsi. Tempat ini dapat berupa Rumah Sakit, Puskesmas, BKIA, TMK, dan tempat-tempat bebas

lainnya yang ditentukan. Tim Medis Keliling adalah tim yang memberikan pelayanan KB yang bersifat *mobile*.

2. Statistik Pendidikan

- Melek Huruf adalah mampu membaca dan menulis huruf latin, dan/atau huruf arab, dan/atau huruf lainnya.
- Pendidikan yang ditamatkan adalah suatu jenjang pendidikan yang telah ditempuh sampai mendapat ijazah.
- Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah.
- Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 7-12/13-15/16-18

$$APS = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12/13 - 15/16 - 18 yang sekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12/13 - 15/16 - 18}} \times 100\%$$

- Angka Partisipasi Sekolah Kasar SD/SMTP/SMTA

$$APK = \frac{\text{Jumlah murid sekolah SD/SMTP/SMTA}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- Angka Partisipasi Sekolah Murni SD/SMTP/SMTA

$$APM = \frac{\text{Jumlah murid usia sekolah SD/SMTP/SMTA}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- Tidak/belum pernah bersekolah adalah tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal,

termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.

- Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal.
- Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, baik yang berada di bawah pengawasan Depdiknas maupun Departemen/instansi lain.
- Rata-rata Lama Sekolah adalah lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas.
- Harapan Lama Sekolah adalah lama sekolah (tahun) yang diharapkan untuk penduduk usia 15 tahun ke atas.

3. Statistik Kesehatan

- Sakit adalah sakit yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.
- Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal atau hal lain.
- Rasio Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tenaga Medis per satu juta penduduk

$$= \frac{\text{Banyaknya Fasilitas Kesehatan Tenaga Medis}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1.000.000$$

-
- Proses kelahiran adalah proses lahirnya janin berusia 5 bulan (22 minggu) ke atas dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran hingga lahirnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluarnya plasenta.
 - Angka Harapan Hidup pada waktu lahir merupakan suatu perkiraan rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk.

4. Statistik Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga

- Konsumsi/Pengeluaran Rumahtangga adalah pengeluaran untuk keperluan rumahtangga yang betul-betul dikonsumsi (dimakan/dipakai) atau dibayarkan tanpa memperhatikan asal barang baik pembelian/ produksi maupun pemberian/pembagian.
- Konsumsi Rata-rata Perkapita Setahun diperhitungkan dari konsumsi rata-rata perkapita dalam seminggu dikalikan dengan 52.
- Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dimakan di luar rumah dan juga termasuk minuman, tembakau dan sirih. Jangka waktu penelitian adalah seminggu sehingga untuk pengeluaran dihitung dengan mengalikan 30/7.

-
- Konsumsi Kalori dan Protein adalah zat gizi yang dihasilkan dari makanan/minuman yang dikonsumsi oleh penduduk. Dalam pengumpulan datanya konsumsi kalori dan protein ini tidak langsung diukur pada waktu pengambilan data di lapangan tetapi dilakukan melalui pengumpulan jumlah/kuantitas bahan makanan yang benar-benar dikonsumsi oleh rumah tangga selama seminggu.
 - Untuk menghitung besarnya zat gizi (Kalori dan Protein) dari bahan makanan yang dikonsumsi oleh rumah tangga, digunakan daftar konversi bahan makanan ke kalori dan protein yang diperoleh dari daftar komposisi bahan makanan. Publikasi Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
 - Konsumsi Kalori dan Protein hanya terbatas pada makanan yang dipersiapkan/dimakan di rumah, tidak termasuk sebagian besar dari konsumsi makanan jadi yang dibeli di luar rumah.
 - Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) adalah kebutuhan minimum selama sebulan dari seorang pekerja yang diukur menurut jumlah kalori, vitamin-vitamin dan bahan mineral lainnya yang diperlukan sesuai dengan tingkat kebutuhan minimum seorang pekerja dan dengan syarat-syarat kesehatan. Barang dan jasa yang diperlukan dalam jumlah minimum, terdiri dari makanan dan minuman,

bahan bakar/penerangan, lain-lain (transpor, rekreasi, obat-obatan, pendidikan, bacaan dan sebagainya).

5. Statistik Ketenagakerjaan

- *Labor force* dan *gainful worker*
- Ada dua pendekatan (*approach*) yang biasa dipakai untuk mengumpulkan data tentang angkatan kerja, yaitu secara "*Gainful Worker*" dan "*Labour Force*". Data yang dikumpulkan dengan cara "*Gainful Worker*" lebih bersifat stabil karena kegiatan/pekerja yang ditanyakan merupakan kegiatan/pekerja yang biasa dilakukan dalam jangka waktu (*time reference*) tertentu. Pengumpulan data tentang angkatan kerja yang dilakukan Badan Pusat Statistik selama ini memakai cara "*Labour Force*" yaitu kegiatan/pekerja yang dilakukan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dalam jangka waktu tertentu.
- Tenaga Kerja adalah jumlah seluruh penduduk berumur lima belas tahun ke atas yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

- Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa.
- Bekerja dalam kegiatan mereka yang selama seminggu yang lalu melakukan pekerjaan paling sedikit satu jam dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan.
- Lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.
- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun keatas).

$$TPAK = \frac{\text{Angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas}} \times 100$$

- Penduduk yang bekerja adalah penduduk yang sudah bekerja termasuk yang sementara tidak bekerja.
- Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.
- Konsep Ketenagakerjaan



6. Statistik Keamanan dan ketertiban Masyarakat

- Kejahatan dalam arti yuridis adalah setiap perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan dan dicantumkan dalam buku II KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Pidana).
- Perkara yang dicakup meliputi perkara pidana kejahatan telah diajukan ke muka sidang pengadilan pada tingkat Pengadilan Negeri dan telah mendapat keputusan hakim.
- Terdakwa adalah mereka yang didakwa atau dituduh melakukan tindak pidana kejahatan.
- Narapidana adalah orang yang dijatuhi hukuman penjara atau pidana kurungan berdasarkan keputusan pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Statistik Perumahan dan Lingkungan Hidup

- Bangunan fisik adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri.
- Rumah milik sendiri, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik krt atau salah seorang art.

-
- Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya.
 - Dinding adalah sisi luar/batas suatu bangunan atau penyekat bangunan fisik lainnya
 - Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari papan, semen, maupun ubin.
 - Luas lantai, adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap).
 - Fasilitas air minum adalah instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/PDAM atau non PAM/PDAM, termasuk sumur dan pompa. Pendekatan yang digunakan adalah air minum yang banyak digunakan dalam satu bulan terakhir.
 - Fasilitas tempat buang air besar adalah ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penduduk Kabupaten Lebong tahun 2016 tercatat 111.063 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Lebong 66,7 jiwa per kilometer persegi. Rasio jenis kelamin sebesar 104, yang berarti bahwa untuk setiap 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten Lebong terdapat 104 orang penduduk laki-laki. Rasio ketergantungan mencapai 49 yang berarti beban tanggungan setiap 100 penduduk usia produktif sebanyak 49 penduduk tidak produktif.

Di bidang pendidikan, Angka Melek Huruf (AMH) penduduk umur 10 tahun ke atas di Kabupaten Lebong tahun 2016 telah mencapai 98,96 persen. Namun, bila dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan semakin menurunnya partisipasi sekolah pada kelompok umur yang lebih tinggi. Begitu pula dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator lainnya seperti angka rata-rata lama sekolah baru mencapai 7,86 tahun, sedangkan angka harapan lama sekolahnya mencapai 12,15 tahun.

Selain pendidikan, tingkat kesehatan masyarakat juga perlu mendapat perhatian, Angka Harapan Hidup(AHH) Kabupaten Lebong tahun 2016 mencapai 62,39 tahun. Persentase penduduk Kabupaten Lebong yang menderita sakit tahun 2016 sebesar 15,32 persen, dengan rata-rata lama sakit selama 6,86 hari. Persentase baduta (anak berusia dibawah dua tahun) yang pernah diberi ASI telah mencapai lebih dari 96,94 persen dimana rata-rata lamanya pemberian ASI selama 11,60 bulan. Balita yang mendapat imunisasi lengkap baru mencapai 40,01 persen.

Terkait dengan jemaah haji, pada periode pemberangkatan 2016/2017 jumlah calon jemaah haji yang diberangkatkan di Kabupaten Lebong yaitu 78 orang. Sedangkan terkait penggunaan telepon seluler (HP), sebanyak 50,38 persen penduduk Kabupaten Lebong berumur 5 tahun ke atas tahun 2016 menguasai/memiliki telepon seluler (HP), dan 14,98 persen mengakses internet (termasuk facebook, twitter, BBM, Whatsapp). Adapun alat yang digunakan untuk mengakses internet paling banyak digunakan adalah HP/ponsel sebesar 87,89 persen. Dilihat dari tempat mengakses internet, paling banyak berasal dari rumah sendiri yaitu 88,17 persen.

Indikator lain yang diharapkan dapat memberikan gambaran bagi perencanaan pembangunan adalah tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lebong tahun 2016 mencapai 13,560 ribu jiwa atau sebesar 12,26 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Lebong. Jika dilihat dari komposisi pengeluaran rumah tangga, persentase pengeluaran untuk makanan di Kabupaten Lebong tahun 2016 sebesar 55,40 persen, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan sebesar 44,60 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lebong tahun 2015 mencapai 72,68 Angka itu menggambarkan bahwa dari setiap 100 orang penduduk usia kerja sebanyak 72 orang diantaranya sudah dan siap masuk ke dalam pasar kerja. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada tahun 2015, lebih banyak mendominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan yaitu mencapai 57,64

persen. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lebong tahun 2015 diperkirakan sebesar 6,81 persen.

Tingkat penyelesaian peristiwa kejahatan yang dilaporkan di Kabupaten Lebong pada tahun 2016 cukup tinggi. Dari 80 peristiwa kejahatan yang dilaporkan masyarakat kepada kepolisian, yang berhasil diselesaikan sebanyak 76 kasus atau 89,41 persen.

Pada tahun 2016, perumahan di Kabupaten Lebong didominasi oleh rumah milik sendiri yang mencapai 87,96 persen, dimana kondisi rumah paling banyak berdinding plasteran anyaman bambu/kawat sebesar 43,02 persen, beratap seng sebesar 96,87 persen, dan berlantai semen/bata sebanyak 42,85 persen. Sumber penerangan utama rumah tangga hampir seluruhnya menggunakan listrik PLN sebanyak 96,31 persen. Sumber air minum yang paling banyak digunakan adalah mata air terlindung/tak terlindung yaitu 32,37 persen. Mayoritas rumah tangga memiliki sendiri fasilitas buang air besar yaitu 54,83 persen. Namun, masih ada 40,86 persen penduduk yang tidak punya fasilitas tempat buang air besar. Mayoritas rumah tangga yang menggunakan kolam/sawah/sungai/danau/laut dan pantai/tanah lapang/kebun/lainnya sebagai tempat pembuangan akhir tinja anggota rumah tangganya sebanyak 58,32 persen.

BAB I PENDAHULUAN

Tujuan dari suatu pembangunan adalah untuk kesejahteraan sosial masyarakat. Pengertian kesejahteraan sosial menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang menunjukkan ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasar secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain: tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk makanan dengan non makanan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, serta kondisi perumahan dan fasilitas yang dimiliki rumah tangga.

Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat berarti pemerintah perlu memperhatikan pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Dalam hal ini, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sosial budaya, pemenuhan kebutuhan yaitu konsumsi masyarakat, keadaan ketenagakerjaan, keamanan serta keadaan perumahan dan lingkungannya.

Oleh karena itu untuk menyampaikan berbagai informasi yang lengkap tentang kondisi sosial dan melihat sejauh mana

proses peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Lebong terwujud, maka Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebong menerbitkan publikasi **Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebong 2016**. Dalam publikasi ini akan disajikan berbagai fenomena yang ada di masyarakat melalui berbagai indikator dari data-data yang dikumpulkan baik dari Dinas terkait maupun survei secara langsung ke masyarakat.

Data-data yang disajikan dibagi atas 10 bab yang terdiri dari :

- Bab 1. Pendahuluan
- Bab 2. Kependudukan yang meliputi persebaran dan laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, komposisi umur penduduk, dan keluarga berencana.
- Bab 3. Pendidikan yang meliputi tingkat pendidikan, partisipasi sekolah, dan fasilitas pendidikan
- Bab 4. Kesehatan meliputi angka harapan hidup, status kesehatan, kesehatan balita.
- Bab 5. Sosial Budaya yang meliputi ibadah haji, pelayanan kesehatan, teknologi komunikasi dan informasi.
- Bab 6. Pola Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga yang meliputi penduduk miskin, perubahan tingkat kesejahteraan, tingkat konsumsi energi dan protein dan pola konsumsi rumah tangga
- Bab 7. Ketenagakerjaan yang meliputi angkatan kerja, penduduk yang bekerja, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT)

-
- Bab 8. Kemanan dan ketertiban masyarakat, meliputi pelanggaran lalu lintas, peristiwa kejahatan,
- Bab 9. Perumahan dan lingkungan yang meliputi status penguasaan tempat tinggal, kualitas dan fasilitas rumah dan tempat tinggal
- Bab 10 Penutup

BAB II KEPENDUDUKAN

Arah kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan pada umumnya berorientasi pada pembangunan kependudukan. Penduduk tidak saja berperan sebagai objek pembangunan tetapi juga subjek pembangunan, Sehingga pembangunan dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Keadaan penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar apabila diimbangi dengan kualitas penduduk yang memadai akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila penduduk yang besar dengan kualitas rendah justru akan menjadi beban bagi pembangunan.

Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan dan lainnya akan sangat berguna untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

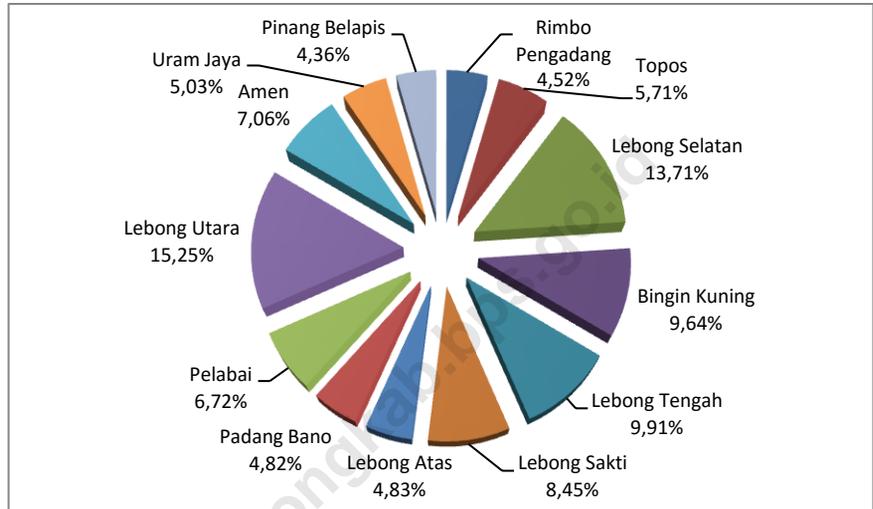
Oleh sebab itu dalam menangani permasalahan penduduk guna menunjang keberhasilan pembangunan, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk yang besar, tetapi juga menitikberatkan pada kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian diharapkan dapat tercipta penduduk yang berkualitas. Selain itu diharapkan

penduduk dapat menjadi pelaku pembangunan dan pemetik hasil pembangunan. Berbagai aspek yang menyangkut kependudukan seperti laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, komposisi umur penduduk, dan keluarga berencana merupakan indikator yang akan dibahas pada bab ini.

2.1 Persebaran dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Lebong sebanyak 111.063 jiwa atau meningkat 1,72 persen dibandingkan tahun 2015. Penduduk Kabupaten Lebong tersebar tidak merata di 12 kecamatan. Seperti tampak pada Gambar 2.1 Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Lebong Utara yang mencapai 16.934 jiwa atau sebesar 15,2 persen, sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Pinang Belapis yang berjumlah 4.847 jiwa atau sebesar 4,4 persen. Terpusatnya penyebaran penduduk di Kecamatan Lebong Utara erat kaitannya dengan pusat kegiatan perdagangan dan pendidikan di Kabupaten Lebong maupun sarana prasarana yang lebih lengkap dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

Gambar 2.1 Distribusi Persentase Penduduk Kabupaten Lebong Menurut Kecamatan, 2016



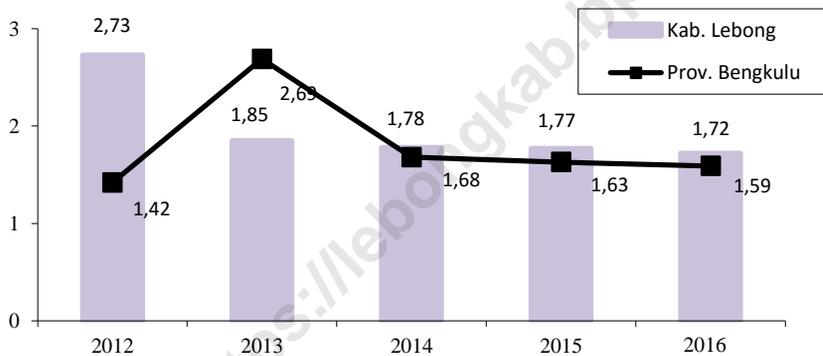
Sumber : Kabupaten Lebong Dalam Angka 2017

Laju pertumbuhan penduduk menggambarkan dinamika penduduk di suatu wilayah. Laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk menentukan perkiraan jumlah penduduk pada tahun-tahun tertentu. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menjadi sumber permasalahan kependudukan. Apabila suatu daerah mempunyai jumlah penduduk besar dengan laju pertumbuhan yang tinggi, maka beban untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya menjadi sangat berat.

Laju pertumbuhan pertumbuhan penduduk Kabupaten Lebong pada kurun waktu 2012-2016 sebesar 1,97 persen. Bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu sebesar 1,80 persen pada kurun waktu yang sama, maka

laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lebong tergolong tinggi. Angka-angka tersebut menggambarkan bahwa pada kurun waktu 2012-2016 jumlah penduduk Kabupaten Lebong telah bertambah rata-rata 1,97 persen per tahun, sedang penduduk Provinsi Bengkulu bertambah rata-rata sebesar 1,80 persen per tahun.

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lebong dan Provinsi Bengkulu, 2012-2016



Sumber :Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2017

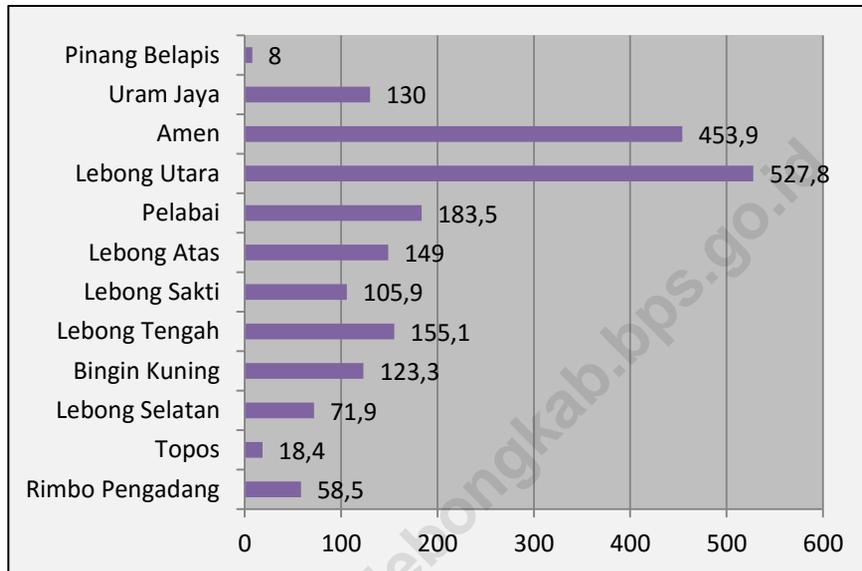
Walaupun demikian, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lebong dari tahun 2012 hingga 2016 menunjukkan trend penurunan. Laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi (migrasi masuk maupun migrasi keluar).

2.2 Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk (*population density*) merupakan gambaran kemampuan wilayah dalam menyediakan daya tampung dan daya dukung bagi penduduk yang ada. Selama tanah dipergunakan untuk tempat tinggal, jalan, dan tempat penduduk melaksanakan kegiatan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (seperti: gedung perkantoran, pabrik, lahan pertanian, sarana untuk pendidikan, keagamaan dan sebagainya), maka tanah akan memiliki keterbatasan kemampuan untuk menampung dan memberikan daya dukung dan daya tampung terhadap penduduk.

Tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian, karena berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antar kecamatan. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah juga akan menimbulkan berbagai masalah, misalnya : penyediaan sarana dan prasarana serta rawan terjadinya konflik sosial masyarakat, dan permasalahan sosial lainnya. Tetapi sebaliknya, jika tingkat kepadatan penduduk sangat rendah akan menyebabkan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat menjadi relatif mahal, karena tempat tinggal penduduk menjadi sangat tersebar atau kesulitan dalam mengakses sarana dan prasarana. Di sisi lain, tingkat kepadatan yang ideal masih sulit ditentukan karena sangat tergantung terhadap potensi yang dimiliki suatu wilayah serta kemampuan penduduk untuk memanfaatkan potensi yang ada.

Gambar 2.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebong Menurut Kecamatan, 2016 (Jiwa/Km²)



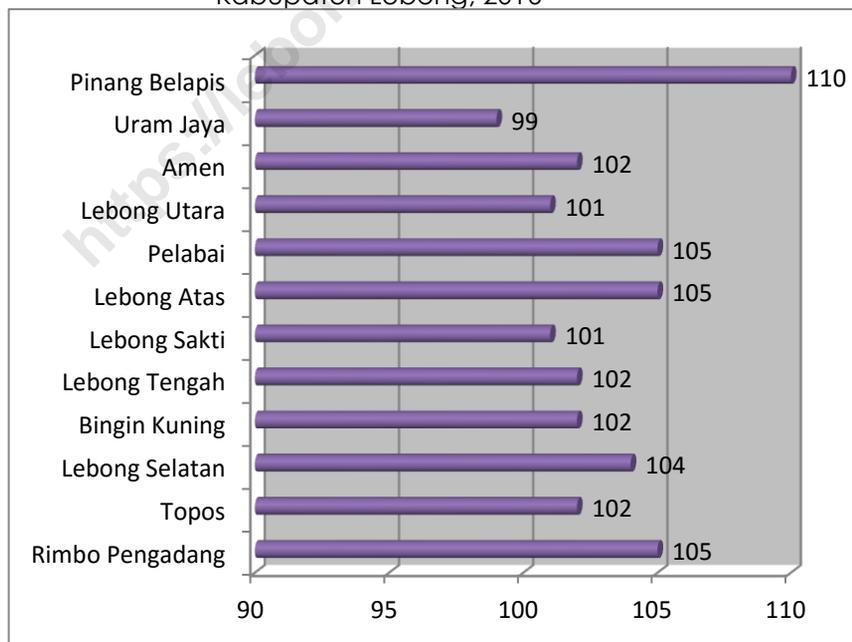
Sumber :Kabupaten Lebong Dalam Angka 2017

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Lebong tahun 2016 adalah 66,7 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Lebong tidak merata. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Lebong Utara yang mencapai 527,8 jiwa per kilometer persegi, Kepadatan penduduk tertinggi kedua yaitu Kecamatan Amen yang mencapai 453,9 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk di kecamatan lainnya kurang dari 200 jiwa per kilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Pinang Belapis yang hanya 8 jiwa per kilometer persegi.

2.3 Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan akan menghasilkan suatu ukuran yang disebut rasio jenis kelamin (*sex ratio*). Dengan kata lain, rasio jenis kelamin menggambarkan banyaknya laki-laki per 100 perempuan. Rasio jenis kelamin merupakan informasi penting dalam perencanaan di bidang kependudukan dan sosial. Sebab dalam memenuhi kebutuhan berbagai ragam pelayanan, jenis pelayanan untuk laki-laki berbeda dengan jenis pelayanan untuk perempuan.

Gambar 2.4 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong, 2016



Sumber :Kabupaten Lebong Dalam Angka 2017

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Lebong dari tahun ke tahun selalu di atas 100. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Lebong selalu lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Rasio jenis kelamin Kabupaten Lebong tahun 2016 sebesar 104, nilai ini menandakan bahwa untuk setiap 100 orang perempuan di Kabupaten Lebong terdapat 104 orang laki-laki.

Rasio jenis kelamin terkecil tahun 2016 terdapat di Kecamatan Uram Jaya sebesar 99. Nilai ini menandakan bahwa untuk setiap 100 orang perempuan di Kecamatan Uram Jaya terdapat 99 orang laki-laki. Sedangkan rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Pinang Belapis sebesar 110. Nilai ini menandakan bahwa untuk setiap 100 orang perempuan di Kecamatan Pinang Belapis terdapat 110 orang laki-laki.

2.4 Komposisi Umur Penduduk

Data komposisi umur sangat penting untuk perencanaan pembangunan suatu wilayah. Kebutuhan penduduk terhadap suatu pelayanan atau produk tertentu sangat bervariasi menurut umur. Contohnya kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan balita berbeda dengan kebutuhan untuk lansia. Fasilitas kesehatan yang dibutuhkan balita cenderung ke arah peningkatan gizi dan imunisasi, sedangkan fasilitas kesehatan bagi lansia lebih cenderung ke arah perawatan penyakit kronis.

Perubahan komposisi penduduk mempengaruhi angka beban ketergantungan (*dependency ratio*), sebab proporsi penduduk usia tidak produktif semakin berkurang. Penurunan rasio beban ketergantungan merupakan salah satu indikator tingkat

keberhasilan pembangunan suatu negara atau daerah. Semakin kecil rasio beban ketergantungan memberi peluang pada penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitasnya, baik sebagai sumberdaya pembangunan maupun sebagai obyek pembangunan.

Untuk menghitung angka beban ketergantungan, penduduk dikelompokkan menjadi tiga komposisi umur, yaitu: kelompok umur anak-anak atau muda 0-14 tahun, kelompok umur produktif 15-64 tahun dan kelompok umur tua 65 ke atas. Seperti tampak pada Tabel 2.1, pada tahun 2016 proporsi penduduk umur muda di Kabupaten Lebong diperkirakan sebesar 28,33 persen dari total penduduk, sedangkan proporsi penduduk umur tua sebesar 4,52 persen.

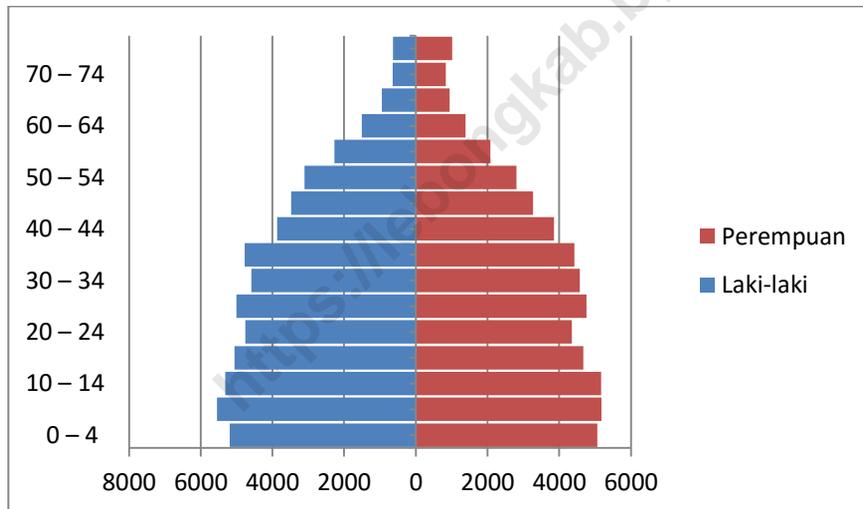
Tabel 2.1 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Lebong, 2016

Uraian	2016
(1)	(2)
Komposisi Penduduk (dalam %)	
0-14	28,33
15-64	67,15
65+	4,52
Angka Beban Ketergantungan (ABK)	49

Sumber :Kabupaten Lebong Dalam Angka 2017

Secara rata-rata beban tanggungan setiap 100 penduduk usia produktif sebanyak 49 penduduk tidak produktif. Sementara itu, umur median Kabupaten Lebong tahun 2016 sebesar 27,18 tahun. Artinya, penduduk Kabupaten Lebong termasuk kategori penduduk *intermediate* (menengah). Umur median berguna untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu.

Gambar 2.5 Piramida Penduduk Kabupaten Lebong, 2016



Sumber :Kabupaten Lebong Dalam Angka 2017, diolah

Cara lain untuk menganalisis data struktur umur yaitu melalui piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik berbentuk piramida yang merupakan gambaran secara visual dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Penggunaan piramida akan membantu memudahkan mengenal dan memahami

karakteristik penduduk suatu wilayah menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Berdasarkan piramidanya, karakteristik penduduk Kabupaten Lebong pada tahun 2016 berciri *expansive*, dimana sebagian besar penduduk Kabupaten Lebong berada pada kelompok umur muda. Dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan kelompok penduduk ini memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua (lihat Gambar 2.5). Fenomena ini serupa dengan bentuk piramida penduduk yang ada di Provinsi Bengkulu.

2.5 Keluarga Berencana

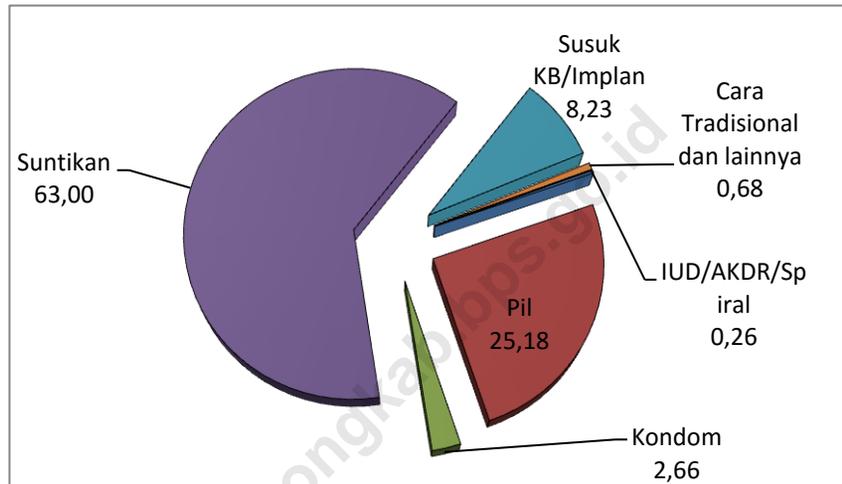
Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu kebijakan pembangunan nasional yang memiliki peranan penting. Tujuan program KB secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga dan secara khusus menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui pembatasan kelahiran.

Secara mikro program KB dilakukan sebagai perlindungan kepada wanita atau ibu dari resiko gangguan kesehatan fisik dan non fisik karena kehamilan atau kelahiran anak yang tidak dikehendaki. Serta resiko akibat sosial ekonomi sebagai konsekuensi dari kehamilan, persalinan, dan perawatan anak yang dilahirkan. Secara makro program KB dilaksanakan untuk memperbaiki keadaan penduduk yang memiliki ciri-ciri tidak

menguntungkan dalam pembangunan seperti tingkat pertumbuhan yang tinggi, struktur penduduk yang muda, beban ketergantungan yang besar, angka kematian bayi yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi sosial ekonomi.

Keberhasilan pelaksanaan program KB dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lebong terlihat dari tingginya persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi. Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2016, tahun 2016 persentase wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan alat kontrasepsi sebesar 64,90 persen. Seperti tampak pada Gambar 2.6, jenis alat/cara KB yang paling banyak digunakan wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yaitu suntik KB sebesar 63 persen dan pil KB sebesar 25,18 persen. Alat kontrasepsi lainnya yang banyak digunakan adalah susuk KB sebesar 8,23 persen, kondom sebesar 2,66 persen, AKDR/IUD/Spiral sebesar 0,26 persen, cara tradisional dan lainnya (pantang berkala, metode menyusui) sebesar 0,68 persen.

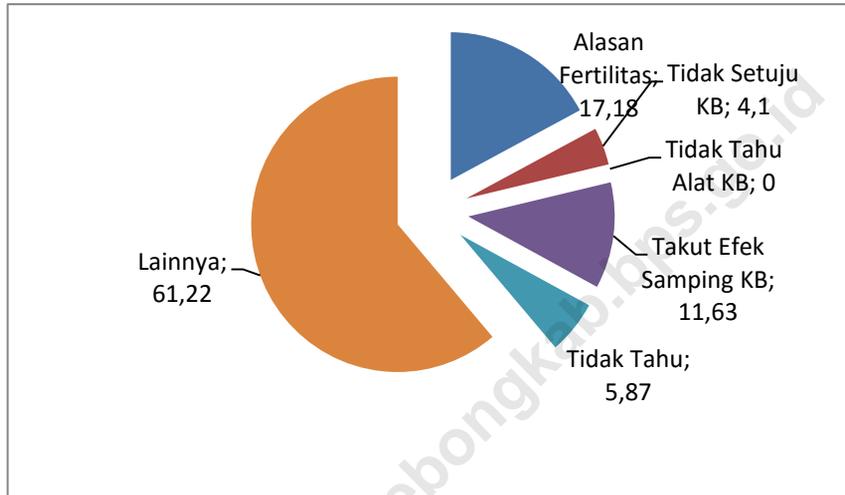
Gambar 2.6 Persentase Penduduk Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Pernah Kawin Menurut Alat/Cara KB yang Dipakai di Kabupaten Lebong, 2016



Sumber : BPS, Susenas 2016

Sementara itu penduduk wanita berumur 15-49 tahun status pernah kawin yang tidak menggunakan alat/cara KB mempunyai alasan ingin segera punya anak atau punya anak lagi. Tetapi ada juga yang berstatus *unmet need* yakni mereka yang tidak ingin segera punya anak tetapi tidak ber-KB. Dari kelompok penduduk wanita berumur 15-49 tahun pernah kawin tetapi tidak sedang menggunakan alat/cara KB dengan status *unmet need* umumnya disebabkan alasan fertilitas (mandul, menopause, puasa kumpul, tradisi, ingin punya anak 2 tahun kemudian) dengan proporsi mencapai 17,18 persen.

Gambar 2.7 Persentase Penduduk Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Tetapi Tidak ber-KB Menurut Alasan Utama Tidak Menggunakan Alat/Cara KB di Kabupaten Lebong, 2016



Sumber : BPS, Susenas 2016

BAB III PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan ketrampilan serta memperluas wawasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang atau suatu bangsa maka kualitas sumber daya manusia yang dimiliki semakin unggul dan tingkat kesejahteraannya semakin baik. Sebab tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan peluang bagi penduduk untuk mendapat pendapatan yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.

Pada dasarnya pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu: pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep "*link and match*", yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan

dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Keberhasilan program pendidikan dapat dievaluasi dari ketersediaan guru dan sekolah yang diukur dengan semakin idealnya rasio murid terhadap guru dan sekolah menurut tingkat pendidikan, rendahnya angka buta huruf, semakin meningkatnya jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingginya partisipasi sekolah penduduk.

3.1 Tingkat Pendidikan

Ukuran tingkat pendidikan yang sangat sederhana pada tingkat makro adalah kemampuan baca tulis penduduk dewasa. Indikator ini merupakan salah satu cara untuk menggambarkan mutu atau kualitas sumber daya manusia secara umum. Semakin tinggi nilai indikator kemampuan baca tulis penduduk suatu daerah maka semakin tinggi mutu sumber daya masyarakatnya.

Program pemerintah dalam memberantas buta huruf di Kabupaten Lebong sudah bisa dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari tingginya persentase penduduk yang telah melek huruf di Kabupaten Lebong. Pada tahun 2016 angka melek huruf telah mencapai 98,96 persen. Angka tersebut mengungkapkan bahwa setiap 100 orang penduduk di Kabupaten Lebong sebanyak 99 orang telah melek huruf. Tingginya angka melek huruf di sisi lain menggambarkan bahwa angka tidak melek huruf atau buta huruf di Kabupaten Lebong relatif rendah sebesar 1,04 persen. Persentase penduduk melek huruf di Kabupaten Lebong

menduduki peringkat kedua tertinggi di Provinsi Bengkulu, setelah kota Bengkulu dengan angka melek huruf sebesar 99,38 persen.

Ukuran lain dari kualitas pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Semakin besar nilai rata-rata lama sekolah penduduk mengungkapkan bahwa jenjang pendidikannya semakin tinggi. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lebong tahun 2016 mencapai 7,86 tahun. Angka tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Lebong hanya menyelesaikan pendidikan sampai jenjang pendidikan kelas 1 SMP. Jika dilihat dari angka harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Lebong tahun 2016 sebesar 12,15 tahun. Artinya, dengan pembangunan pendidikan yang ada sekarang, diharapkan penduduk dapat bersekolah rata-rata sampai dengan 12 tahun atau sampai kelas 2 SMA. Namun, masih ada gap sekitar 5 tahun antara HLS dan RLS yang menyatakan masih ada jarak antara harapan dan kenyataan pembangunan pendidikan di Kabupaten Lebong.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator utama dalam menggambarkan kualitas penduduk atau SDM, yang dinilai dari tingkat pendidikan penduduk berumur 10 tahun ke atas. Semakin tinggi proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi maka SDM-nya semakin berkualitas. Kondisi itu secara nyata dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Kualitas pendidikan di Kabupaten Lebong ditandai dengan tingginya persentase penduduk yang belum tamat SD serta rendahnya persentase penduduk yang tamat universitas. Seperti tampak pada Tabel 3.1 proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang belum tamat SD sebesar 22,74 persen sedangkan tamat universitas hanya 3,63 persen.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk 10 tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Ditamatkan di Kabupaten Lebong, 2016

Tingkat Pendidikan Ditamatkan		2016
(1)		(2)
Belum Tamat SD		22,74
SD		34,84
SMP		13,81
SMA		23,79
Diploma +Akademi		1,18
Universitas		3,63

Sumber: BPS, Susenas 2016

3.2 Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan atau bersekolah, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong, 2016

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
7-12	100,00	100,00	100,00
13-15	100,00	97,50	98,77
16-18	82,42	79,97	79,67
19-24	17,55	18,30	17,87

Sumber: BPS, Susenas 2016

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lebong semakin menurun pada kelompok umur yang lebih tinggi. Pada Tabel 3.2 tampak bahwa APS usia 7-12 tahun telah mencapai 100 persen dan APS kelompok umur 13-15 tahun sebesar 98,77 persen. Sementara, APS kelompok umur 16-18 sebesar 79,67 persen dan APS kelompok umur 19-24 sebesar 17,87 persen.

Berdasarkan tabel 3.2 jika dilihat dari jenis kelamin, APS kelompok umur 7-12 untuk laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Pada kelompok umur 13-15, APS laki-laki sebesar 100, sedangkan perempuan sebesar 97,50. Sementara pada kelompok umur 19-24, APS laki-laki sebesar 17,55 sedangkan APS perempuan mencapai 18,30. Walaupun demikian, perbedaan APS laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan tidak ada bias gender dalam pendidikan.

Salah satu ukuran keberhasilan program pemerintah di bidang pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah nilai Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah perbandingan jumlah siswa yang sedang sekolah di jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu tersebut. Kelompok umur 7-12 tahun setara dengan jenjang pendidikan SD, kelompok umur 13-15 tahun setara dengan jenjang pendidikan SMP, dan kelompok umur 16-18 tahun setara dengan jenjang pendidikan SMA, dan kelompok umur 19-24 setara dengan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT).

Pada Tabel 3.3 tampak bahwa kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Lebong pada semua jenjang pendidikan relatif sama dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), dimana semakin tinggi jenjang pendidikan nilai APK-nya semakin kecil. Pada tahun 2016 APK pada jenjang pendidikan SD sebesar 112,92 persen. Angka tersebut mengungkapkan bahwa jumlah anak yang sekolah di jenjang pendidikan SD lebih besar dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Dengan perkataan lain, di Kabupaten Lebong masih terdapat penduduk berusia kurang dari 7 tahun dan/atau berusia lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD.

Pada tahun 2016 nilai APK di jenjang pendidikan SMP sebesar 108,03 persen dan APK di jenjang pendidikan SMA sebesar 75,57 persen, sedangkan APK di jenjang PT sebesar 22,24 persen. Masih relatif rendahnya APK pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi kemungkinan disebabkan akses untuk mencapai fasilitas

pendidikan, keterbatasan kemampuan ekonomi sehingga anak usia sekolah terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumahtangga atau keluarga dan faktor budaya lokal.

Tabel 3.3. Angka Partisipasi Kasar Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lebong, 2016

Jenjang Pendidikan	Nilai APK
(1)	(2)
SD	112,92
SMP	108,03
SMA	75,57
PT	22,24

Sumber: BPS, Susenas 2016

Indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah perbandingan antara jumlah murid yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai, dinyatakan dalam persen. APM pada suatu tingkat pendidikan mengukur banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam suatu tingkat pendidikan untuk setiap 100 penduduk usia sekolah. Usia sekolah 7-12 untuk tingkat pendidikan SD, usia sekolah 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan SMP dan usia 16-18 tahun untuk tingkat pendidikan SMA. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu tingkat pendidikan yang sesuai.

Sama kondisinya dengan APS dan APK, nilai APM Kabupaten Lebong pada pendidikan yang lebih tinggi juga kecil. Seperti terlihat pada Tabel 3.4, APM di jenjang pendidikan SD sebesar 98,04 persen, APM di jenjang pendidikan SMP sebesar 82,13 persen, APM di jenjang pendidikan SMA sebesar 58,99 persen.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong, 2016

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	100,00	96,26	98,04
SMP	84,12	80,06	82,13
SMA	68,60	49,57	58,99
PT	13,90	17,47	15,44

Sumber: BPS, Susenas 2016

Ditinjau menurut jenis kelamin, partisipasi anak usia sekolah laki-laki untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang tinggi lebih baik dibandingkan dengan anak usia sekolah perempuan, kecuali pada jenjang pendidikan PT. Pada tahun 2016 APM penduduk laki-laki di jenjang pendidikan PT sebesar 13,09 persen sedangkan APM penduduk perempuan di jenjang pendidikan PT sebesar 17,47 persen.

3.3 Fasilitas Pendidikan

Rasio murid-sekolah dan rasio murid-guru adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Jumlah murid per sekolah adalah indikator input yang erat kaitannya untuk menentukan perlunya suatu sekolah baru harus dibangun di suatu wilayah. Sedangkan rasio murid-guru digunakan untuk menggambarkan beban guru dalam mengajar. Angka ini juga dapat digunakan untuk melihat mutu pengajaran di kelas. Sebab semakin tinggi nilai rasio murid guru berarti semakin berkurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Berdasarkan Tabel 3.5, pada jenjang pendidikan SD rasio murid-sekolah sebesar 114,54, di jenjang pendidikan SMP sebesar 210,92 dan di jenjang pendidikan SMA sebesar 298,14. Diharapkan dengan peningkatan penyediaan sarana pendidikan dasar dan menengah akan meningkatkan partisipasi sekolah pada kedua jenjang pendidikan tersebut.

Rasio murid-guru di jenjang pendidikan SD pada tahun ajaran 2016/2017 sebesar 12,13. Rasio murid-guru di jenjang SD tersebut mengungkapkan bahwa secara rata-rata setiap satu guru mengajar 12 orang murid. Rasio murid-guru yang relatif kecil juga terdapat di jenjang pendidikan SMP dan SMA yaitu sebesar 10,50 untuk SMP dan 12,28 untuk SMA. Dengan hal ini diharapkan proses belajar mengajar akan lebih optimal.

Tabel 3.5 Perkembangan Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Sekolah di Kabupaten Lebong, 2013/2014-2016/2017

Tahun	Rasio Murid-Guru			Rasio Murid-Sekolah		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013/2014	17,00	13,87	10,98	126,28	205,71	287,00
2014/2015	10,89	10,63	11,72	118,15	210,92	287,66
2015/2016	10,55	11,03	12,39	120,28	219,13	300,86
2016/2017	12,13	10,50	12,28	114,54	210,92	298,14

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong

Keterangan: *)SD tidak termasuk MI dan Paket A, SLTP tidak termasuk MTs dan Paket B, dan SLTA tidak termasuk SMK, MAN dan Paket C

BAB IV KESEHATAN

Selain pendidikan, kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang sangat mendasar. Jika pendidikan merupakan hal pokok untuk menggapai kehidupan yang lebih baik maka kesehatan merupakan inti kesejahteraan. Salah satu ukuran kualitas fisik penduduk adalah derajat kesehatan penduduk. Tinggi rendahnya derajat kesehatan penduduk dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka harapan hidup.

Faktor penting lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang diukur dari angka kesakitan. Sementara, gambaran kemajuan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan, dan jenis pengobatan yang dilakukan.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu mendapat perhatian utama. Upaya tersebut antara lain dapat dilakukan melalui pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan secara berkelanjutan dan pengadaan/peningkatan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

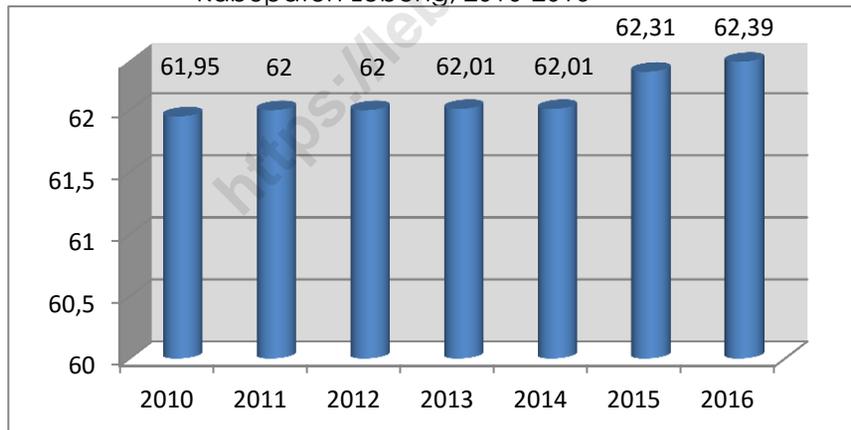
4.1 Angka Harapan Hidup

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan adalah menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya Angka Harapan Hidup ($e_0 = AHH$). AHH adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani seseorang

hingga akhir hayatnya. Peningkatan angka harapan hidup dapat tercapai apabila disertai membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan.

Data angka harapan hidup di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Rendahnya angka harapan hidup di suatu daerah mengindikasikan perlunya optimalisasi pelaksanaan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya seperti: kesehatan lingkungan, peningkatan konsumsi gizi dan kalori masyarakat.

Gambar 4.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Lebong, 2010-2016



Sumber: BPS

Pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Lebong cukup berhasil. Fenomena itu tergambar dari peningkatan angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lebong. Pada Gambar 4.1 tampak bahwa angka harapan hidup

penduduk Kabupaten Lebong tahun 2010 diperkirakan sebesar 61,95 tahun, kemudian meningkat menjadi 62,39 tahun pada tahun 2016. Artinya, anak yang lahir hidup pada tahun 2016 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 62,39 tahun. Walaupun demikian, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lebong merupakan terendah se-Provinsi Bengkulu.

4.2 Status Kesehatan

Status kesehatan penduduk yang kurang baik dapat memberi pengaruh negatif pada banyak aspek kehidupan, seperti: menurunnya produktivitas dan vitalitas, terganggunya aktivitas kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Status kesehatan menggambarkan kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu. Status kesehatan penduduk diukur dengan angka kesakitan penduduk. Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan atas suatu penyakit yang menyebabkan terganggunya aktifitas sehari-hari. Keluhan dimaksud berdasarkan pengakuan responden, bukan hasil pemeriksaan dokter atau petugas kesehatan lainnya. Selain itu status kesehatan dapat juga dilihat dari rata-rata lama sakit. Angka rata-rata lama sakit mengandung artian bahwa untuk penduduk yang menderita sakit sebulan yang lalu memerlukan berapa hari agar bisa sehat kembali.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk yang Menderita Sakit di Kabupaten Lebong, 2016

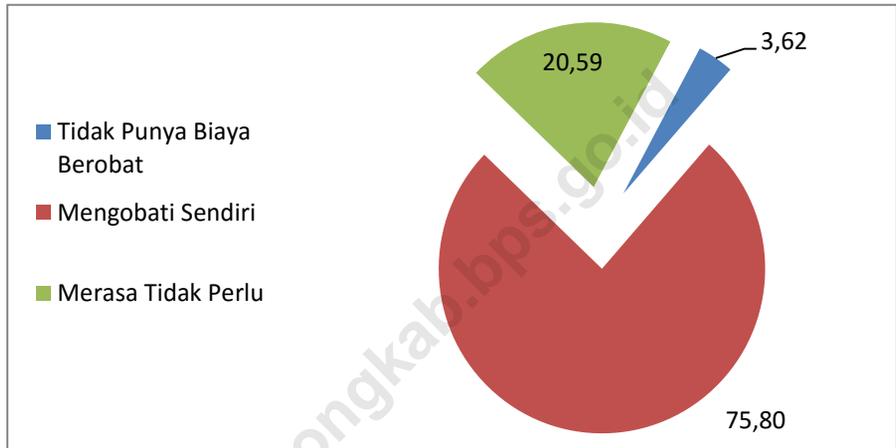
Rincian	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk yang Menderita Sakit (persen)	15,61	15,03	15,32

Sumber: BPS, Susenas 2016

Pada tahun 2016 persentase penduduk Kabupaten Lebong yang menderita sakit sebesar 15,32 persen. Sebanyak 15 persen penduduk tersebut menderita sakit rata-rata hampir mencapai satu minggu atau tepatnya selama 6,86 hari. Apabila hal tersebut dialami penduduk dewasa yang bekerja, maka dampak dari masih rendahnya status kesehatan akan menurunkan produktivitas kerja. Begitu juga jika dialami anak usia sekolah, akan mengganggu aktivitas belajarnya di sekolah.

Penduduk Kabupaten Lebong yang menderita sakit tidak semuanya mengobati penyakitnya. Hanya 43,44 persen berobat jalan. Sisanya tidak berobat jalan dengan berbagai alasan. Dan alasan terbesar adalah karena mengobati sakitnya sendiri (75,80 persen) dan merasa tidak perlu (20,59 persen). Walaupun kecil, tapi masih ada 3,62 persen penduduk yang sakit, tidak berobat jalan dengan alasan tidak punya biaya berobat.

Gambar 4.2 Persentase Penduduk yang Sakit, Tetapi Tidak Berobat Jalan Sebulan Terakhir Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Lebong, 2016



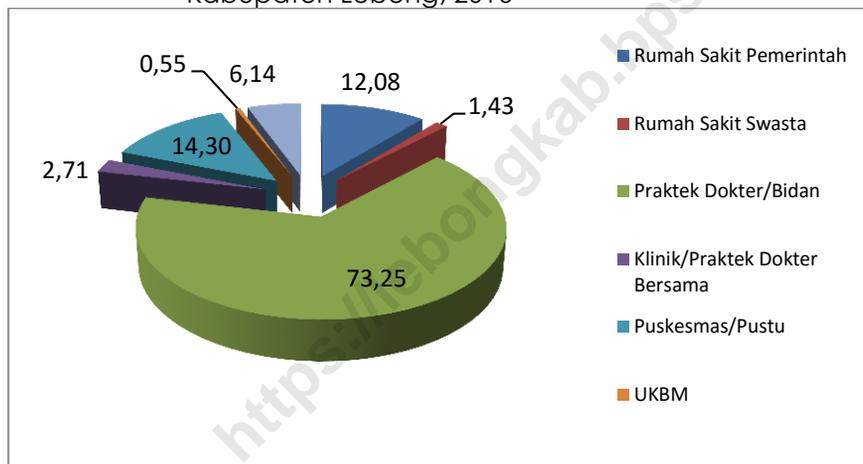
Sumber: BPS, Susenas 2016

Masih tingginya persentase penduduk yang mengobati sendiri penyakitnya adalah suatu hal yang tidak diinginkan. Seharusnya setiap keluhan kesehatan yang dialami harus dikonsultasikan ke paramedis yaitu dokter dan perawat kesehatan, untuk dilakukan diagnosa secara tepat terhadap jenis penyakit yang diderita, serta diberikan obat maupun perawatan yang sesuai.

Mengobati sendiri penyakit yang diderita, tampaknya dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lebong. Padahal pengobatan yang tidak berdasarkan hasil diagnosa secara medis justru akan membuat tubuh menjadi semakin rentan terhadap penyakit sebagai akibat mengkonsumsi obat tidak tepat dosis.

Tempat favorit untuk berobat jalan adalah Praktek Dokter/Bidan dan Puskesmas/Pustu. Praktek Dokter/Bidan dan Puskesmas/Pustu biasanya berada di lingkungan perumahan masyarakat, sehingga mudah dijangkau dan biasanya memiliki jadwal praktek yang *flexible* sehingga memudahkan masyarakat untuk berkunjung.

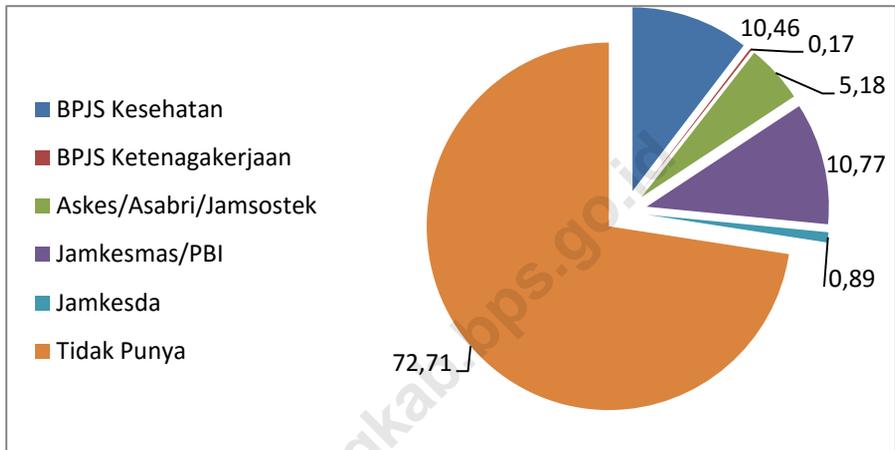
Gambar 4.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Lebong, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

Tidak sampai seperlima (17,54 persen) dari jumlah penduduk yang berobat jalan menggunakan jaminan kesehatan. Dari seluruh penduduk Kabupaten Lebong, baik sakit atau tidak, berobat jalan atau tidak, hanya 27,29 persen yang sudah memiliki jaminan kesehatan. Jenis jaminan kesehatan yang dimiliki penduduk Kabupaten Lebong sebagian besar adalah BPJS Kesehatan, Jamkesmas/PBI, dan Askes/Asabri/Jamsostek.

Gambar 4.4 Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki Penduduk Kabupaten Lebong, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

Sementara itu, penduduk yang pernah rawat inap dalam kurun waktu 1 tahun terakhir sebanyak 2,85 persen. Berdasarkan tempat rawat inap, mayoritas menginap di Rumah Sakit Pemerintah sebesar 89,69 persen. Selain itu menjalani rawat inap di Rumah Sakit Swasta sebesar 6,54 persen, Praktek Bidan/Dokter sebesar 7,23 persen, Puskesmas/Pustu sebesar 3,38 persen, dan Praktek Pengobatan Tradisional/Alternatif sebesar 3,29 persen.

4.3 Kesehatan Balita

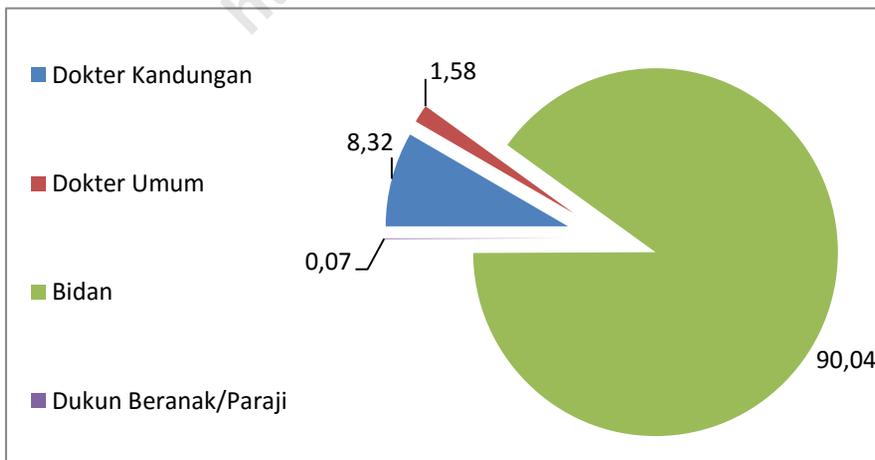
Menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan merupakan prioritas utama pembangunan bidang kesehatan. Upaya yang telah dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut diantaranya: mengoptimalkan

posyandu, menambah jumlah bidan desa, dan melaksanakan pekan imunisasi nasional.

Pengoptimalan posyandu bertujuan untuk meningkatkan gizi balita melalui pemberian makanan tambahan bayi, pelayanan kesehatan balita, serta pelaksanaan imunisasi sehingga resiko kematian bayi menjadi berkurang. Penambahan bidan desa bertujuan agar penolong persalinan yang ditangani tenaga kesehatan dapat meningkat, sehingga resiko kematian ibu melahirkan dapat ditekan sekecil mungkin.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan di bidang kesehatan khususnya di desa-desa, persentase balita yang penolong kelahirannya ditangani tenaga kesehatan dokter dan bidan pada tahun 2016 telah mencapai 100 persen, di mana sebagian besar telah ditangani bidan dan dokter kandungan.

Gambar 4.5 Persentase Kelahiran Bayi Menurut Penolong Persalinan Terakhir di Kabupaten Lebong, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

Air Susu Ibu (ASI) merupakan mikronutrien penting bagi balita. Pemberian ASI dalam waktu yang cukup pada balita dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit lainnya. Lamanya balita diberi ASI yang terbaik adalah sampai usia dua tahun atau 24 bulan. Sejak lahir sampai usia enam bulan bayi sebaiknya diberi ASI saja atau ASI eksklusif. Setelah berumur enam bulan bayi mulai diberikan makanan tambahan pendamping ASI sampai usia dua tahun. Setelah menginjak umur dua tahun bayi sudah siap disapih.

Tingkat kesadaran ibu dalam memberikan ASI kepada balita di Kabupaten Lebong tahun 2016 relatif tinggi, Namun, lama pemberian ASI belum sesuai dengan keadaan yang diharapkan. Persentase baduta (anak berusia dibawah dua tahun) yang pernah diberi ASI di Kabupaten Lebong telah mencapai lebih dari 96,94 persen. Hal itu berarti persentase balita yang tidak pernah diberi ASI semenjak lahir hanya sebesar 3,06 persen. Rata-rata lamanya pemberian ASI di Kabupaten Lebong selama 11,60 bulan.

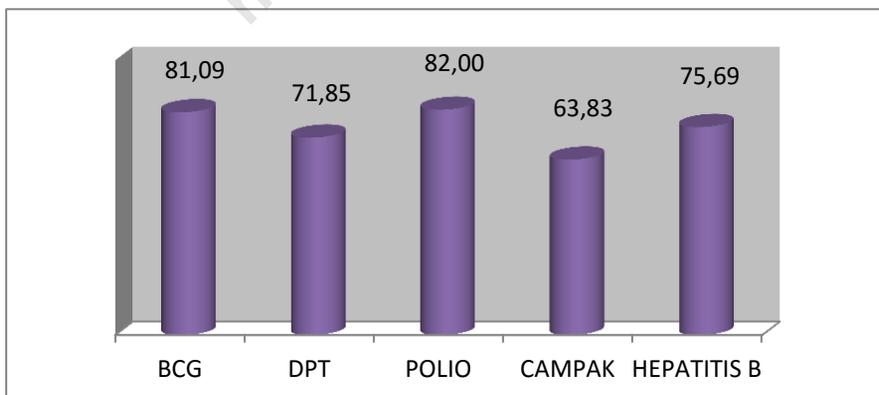
Salah satu cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit yakni melalui imunisasi. Beberapa penyakit yang dapat dihindari dengan imunisasi yaitu hepatitis B, campak, polio, difteri, tetanus, batuk rejan, gondongan, cacar air, tbc, dan lain sebagainya.

Jenis imunisasi ada dua macam, yaitu: pertama, imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan dari ibu terhadap penyakit. Kedua, imunisasi aktif di mana kekebalan tubuh didapat dari pemberian bibit penyakit yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh guna membentuk antibodi terhadap penyakit yang sama

baik yang lemah maupun yang kuat. Antibodi itu umumnya bisa terus ada di dalam tubuh orang yang telah diimunisasi untuk melawan penyakit yang mencoba menyerang. Imunisasi tidak cukup hanya dilakukan satu kali, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan lengkap guna pencegahan terhadap berbagai penyakit yang sangat membahayakan kesehatan dan hidup anak.

Seperti tampak pada Gambar 4.6, persentase anak balita yang pernah mendapatkan imunisasi di Kabupaten Lebong hingga tahun 2016 sudah cukup tinggi. Tetapi, grafik tersebut juga mengungkapkan bahwa masih terdapat anak balita yang belum mendapatkan imunisasi khususnya imunisasi campak, dimana sekitar 36,17 persen anak balita belum mendapat imunisasi campak.

Gambar 4.6 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi di Kabupaten Lebong, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

Balita yang mendapat imunisasi lengkap di Kabupaten Lebong sebanyak 40,01 persen. Angka ini merupakan angka terendah kedua se Provinsi Bengkulu setelah Kabupaten Kaur, dimana persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap sebesar 29,27 persen.

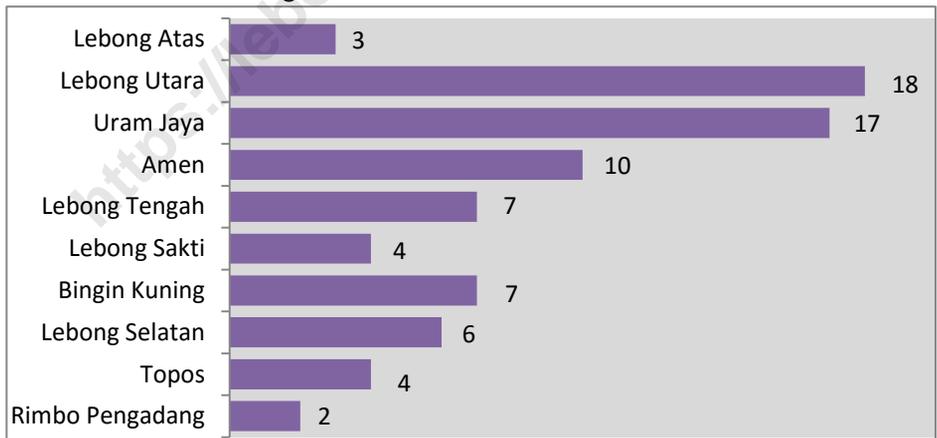
Masih ditemuinya anak balita yang tidak pernah mendapatkan imunisasi diduga disebabkan kurangnya informasi ataupun aksesibilitas terhadap imunisasi. Kondisi lain kemungkinan disebabkan kesengajaan orangtua untuk tidak memberikan imunisasi kepada anaknya dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah ketidakpercayaan pada vaksin memiliki efek protektif mencapai 100 persen. Program sosialisasi peduli kesehatan keluarga dan imunisasi sejak usia dini perlu terus digalakkan secara terbuka demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif.

BAB V SOSIAL BUDAYA

5.1 Ibadah Haji

Menunaikan ibadah haji bagi umat Islam adalah salah satu wujud dari pelaksanaan rukun Islam. Peningkatan jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun disamping mencerminkan ketaatan dalam menjalankan perintah agama juga dapat dijadikan sebagai indikator semakin membaiknya status kehidupan sosial dan kemampuan ekonomi umat Islam.

Gambar 5.1 Jumlah Calon Jamaah yang Diberangkatkan ke Tanah Suci Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong, 2016



Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Lebong

Pada periode pemberangkatan 2016/2017 jumlah calon jamaah haji yang diberangkatkan yaitu 78 orang. Jamaah terbanyak berasal dari Kecamatan Lebong Utara, yaitu seperlima dari total jamaah. Bila dibandingkan dengan keinginan dan

kemampuan ekonomi umat Islam di Kabupaten Lebong maka jumlah calon jemaah haji yang diberangkatkan setiap tahunnya masih tergolong rendah. Hal tersebut kemungkinan terkait dengan masih rendahnya kuota calon jemaah haji yang ditetapkan untuk Kabupaten Lebong. Jamaah haji yang berasal dari Kabupaten Lebong mendapat kuota terkecil se-Provinsi Bengkulu.

5.2 Teknologi Komunikasi dan Informasi

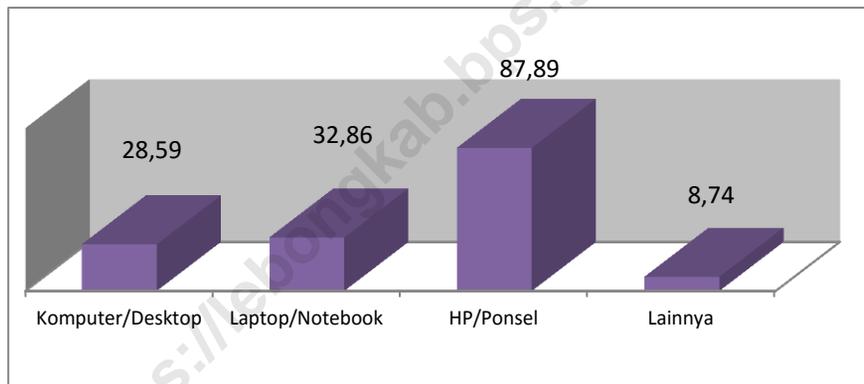
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir. Secara langsung maupun tidak akan mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Semakin membaiknya kondisi perekonomian masyarakat dan banyaknya produk alat komunikasi yang ditawarkan dengan harga terjangkau, mengakibatkan masyarakat di perkotaan maupun di perdesaan telah memiliki alat komunikasi seperti: telepon selular/*hand phone* (HP), modem untuk akses internet, dan lain-lain. Oleh karena itu, saat ini masyarakat dari berbagai golongan sudah mampu menerima informasi sendiri melalui teknologi komunikasi yang dimiliki dengan cepat serta tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Penduduk yang telah memanfaatkan teknologi informasi komunikasi di Kabupaten Lebong relatif tinggi, yang terlihat dari tingginya penguasaan telepon selular atau *hand phone* (HP). Pada tahun 2016 persentase penduduk yang menguasai telepon selular atau *hand phone* (HP) mencapai 50,38 persen.

Sementara itu, jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet (termasuk *Facebook*, *Twitter*, *BBM*,

Whatsapp) dalam 3 bulan terakhir di Kabupaten Lebong pada tahun 2016 hampir mencapai 15 persen. Dari jumlah tersebut paling banyak mengakses internet melalui handphone. Selengkapya bisa lihat gambar 5.2.

Gambar 5.2 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Alat yang Digunakan di Kabupaten Lebong, 2016 (Persen)

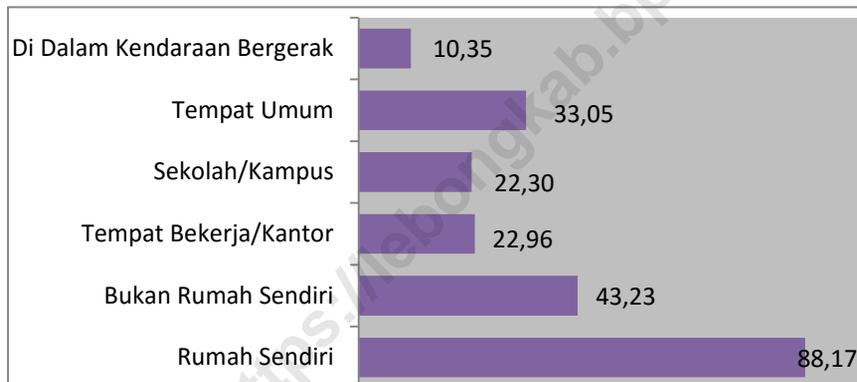


Sumber: BPS, Susenas 2016

Tingginya penggunaan telepon genggam untuk mengakses internet dapat disebabkan oleh harga tarif akses internet yang relatif murah dan banyaknya operator yang menawarkan paket-paket data murah khususnya untuk mengakses jejaring sosial misal *facebook*, *twitter*, dan *instagram*. Terbukti Indonesia merupakan salah satu negara yang warganya merupakan pengguna media sosial tersebut. Arus informasi yang demikian mudahnya bagai pedang bermata dua jika pemerintah tidak pandai mengelola. Satu sisi hal ini merupakan hal positif sebab akses informasi kini tak lagi didominasi masyarakat perkotaan

bahkan media sosial telah masuk ke pedesaan utamanya kalangan muda/pelajar. Namun, kemudahan ini juga bisa memberikan efek negatif kalau tidak dilakukan *filtering* dari pemerintah, sebab informasi pornografi, *bullying* lewat media sosial, *trafficking* anak juga makin mudah terjadi.

Gambar 5.3 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tempat Mengakses Internet di Kabupaten Lebong, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

Beberapa tahun terakhir, internet menjadi mainan baru untuk anak-anak. Kemudahan akses dan keragaman hiburan yang disediakan membuat internet menjadi gaya hidup baru dalam masyarakat. Peran orang tua sangat utama dalam mendampingi anak dalam mengakses internet karena tempat mengakses internet kebanyakan dari rumah sendiri (88,17 persen).

BAB VI

POLA KONSUMSI DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Pendapatan merupakan indikator yang sering digunakan dalam mengukur tingkat kemakmuran penduduk. Semakin tinggi dan meningkat pendapatan penduduk mengindikasikan kondisi kehidupan yang semakin makmur dan sejahtera.

BPS masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan angka pendapatan secara langsung dari rumah tangga. Kendala utama yang dihadapi dalam pengumpulan data pendapatan di lapangan yakni tidak terbukanya rumah tangga dalam mengungkapkan seberapa besar pendapatan riil mereka. Sehingga untuk mendapatkan angka pendapatan rumah tangga, BPS menggunakan metode pendekatan pengeluaran rumah tangga. Asumsinya, pengeluaran rumah tangga berbanding lurus dengan pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk memenuhi konsumsi atau pengeluaran makanan maupun bukan makanan, maka sumber pendapatan rumah tangga juga diperkirakan tinggi.

Selain dalam bentuk rupiah, pengeluaran per kapita penduduk juga dapat dinilai dari konsumsi energi dan protein per kapita. Total energi dan protein yang dikonsumsi sehari-hari bila dikaitkan dengan kebutuhan minimum tubuh manusia akan energi dan protein, dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang telah dicapai. Dalam pemanfaatan yang lebih luas angka pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk menghitung angka kemiskinan atau penduduk miskin.

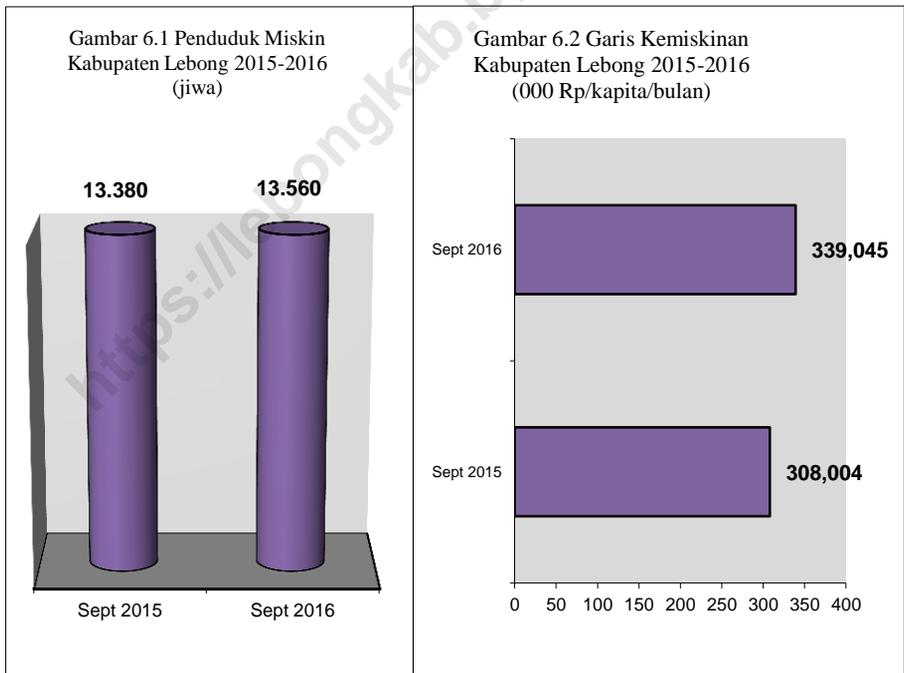
Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan. Semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk makanan mengindikasikan taraf kehidupan yang masih rendah, sebaliknya semakin tinggi pengeluaran bukan makanan mengindikasikan taraf kehidupan yang semakin baik. Sebab, konsumsi makanan memiliki batas maksimal, dan konsumsi bukan makanan tidak memiliki batas maksimal. Ketika kebutuhan makanan telah terpenuhi, kelebihan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan, misalnya: pembelian barang-barang tahan lama, mobil, motor, dll.

6.1. Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Ukuran kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan adalah nilai rupiah pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum dalam rupiah untuk pengeluaran perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya sejumlah rupiah untuk pengeluaran makanan dan bukan makanan dalam batas minimum disebut sebagai garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Ditinjau dari jumlahnya, penduduk miskin Kabupaten Lebong pada kurun waktu 2015-2016 (September-September) mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin (kondisi

September) mengalami peningkatan dari 13.380 orang menjadi 13.560 orang atau bertambah sekitar 180 orang. Hal ini berbanding terbalik dengan persentase penduduk miskin justru mengalami penurunan, dari sebesar 13,32 persen menjadi 12,26 persen atau menurun sebesar 0,06 persen. Perubahan jumlah maupun persentase penduduk miskin ini, merupakan salah satu indikator yang dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Lebong.



Sumber :Kabupaten Lebong Dalam Angka 2017

Peningkatan jumlah penduduk miskin erat kaitannya dengan peningkatan garis kemiskinan yang seiring dengan meningkatnya harga berbagai bahan kebutuhan hidup sehari-hari

selama 2015-2016 (September-September). Peningkatan garis kemiskinan yang tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan penduduk miskin dan penduduk hampir miskin, mengakibatkan penduduk miskin semakin miskin dan penduduk hampir miskin menjadi jatuh miskin atau hidup di bawah garis kemiskinan. Seperti tampak pada Gambar 6.2 yang memperlihatkan nilai garis kemiskinan pada periode September 2015-2016 meningkat dari 308.004 rupiah/kapita/bulan menjadi 339.045 rupiah/kapita/bulan atau naik sebesar 10,08 persen.

6.2. Pola Konsumsi Rumah Tangga

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Tinggi rendahnya pendapatan rumah tangga dapat mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga, porsi pengeluaran idealnya bergeser dari makanan menjadi bukan makanan. Porsi pengeluaran bukan makanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk semakin baik.

Persentase pengeluaran untuk makanan di Kabupaten Lebong tahun 2016 sebesar 55,40 persen, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan sebesar 44,60 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa, pendapatan yang diperoleh rumah tangga lebih besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan dibandingkan pendidikan, kesehatan, rekreasi dan bukan makanan lainnya.

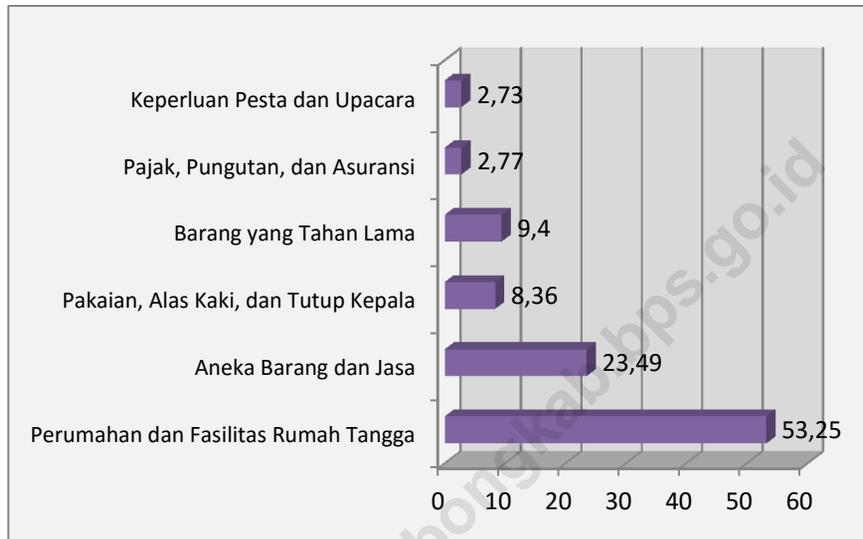
Gambar 6,3 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Lebong, 2016



Sumber :Kabupaten Lebong Dalam Angka 2017

Pada Gambar 6.3 dan 6,4 ditunjukkan komposisi rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk beberapa jenis bahan makanan dan bukan makanan. Pada kelompok bahan makanan, persentase rata-rata pengeluaran tertinggi adalah tembakau dan sirih, kemudian makanan dan minuman jadi, dan padi-padian. Tingginya konsumsi rokok menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengalokasikan pendapatan untuk mengkonsumsi barang yang mampu meningkatkan kesehatan keluarga. Selain itu, tingginya kontribusi makanan dan minuman dimungkinkan terjadi karena perubahan pola konsumsi masyarakat yang ingin lebih praktis dan siap saji, serta kemudahan akses berbagai jenis makanan dan minuman jadi.

Gambar 6,4 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Lebong, 2016



Sumber :Kabupaten Lebong Dalam Angka 2017

Jika dilihat dari kelompok bukan makanan, pada tahun 2016 persentase rata-rata pengeluaran tertinggi adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 53,25 persen. Pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga yang dimaksud seperti pengeluaran sewa rumah, perbaikan kecil rumah, listrik, tabung gas, dan lain-lain. Pengeluaran terbesar kedua yaitu aneka barang dan jasa sebesar 23,49 persen.

BAB VII KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia, sebab mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Yang dimaksud dengan dimensi ekonomi di sini adalah tanpa adanya pekerjaan sebagai sumber penghasilan rumah tangga akan mengancam kelangsungan hidup anggota rumah tangganya. Sedang yang dimaksud dengan dimensi sosial adalah makin banyaknya anggota masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau makin banyak penganggur akan menjadi potensi untuk melakukan tindak kejahatan atau tindakan lain yang akan mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat.

7.1 Angkatan Kerja

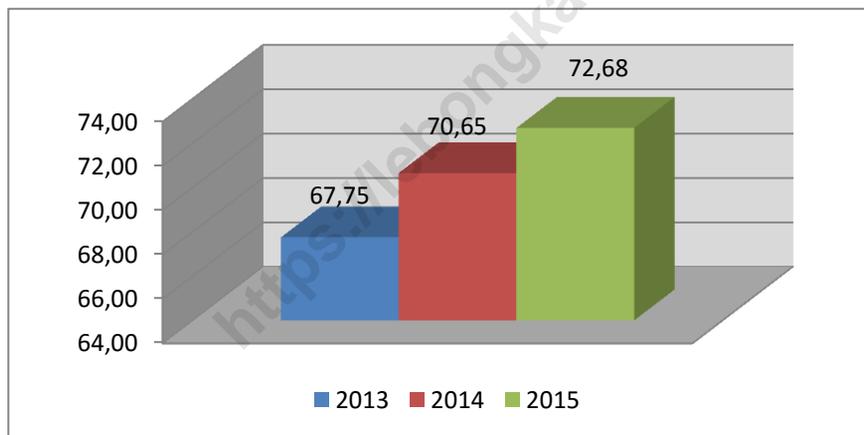
Kegiatan bekerja atau mencari kerja adalah melakukan kegiatan yang bernilai ekonomis atau dengan kata lain masuk ke dalam pasar kerja. Mereka yang masuk ke dalam pasar kerja disebut angkatan kerja. Besaran umum yang sering dipakai dalam mengukur minat penduduk untuk masuk ke dalam pasar kerja yakni Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Apabila tingginya TPAK disebabkan tingginya penduduk yang bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Sebaliknya, bila tingginya TPAK diiringi dengan rendahnya tingkat kesempatan kerja atau rendahnya persentase penduduk yang bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi

angkatan kerja yang tidak sehat. Kondisi ketenagakerjaan yang seperti itu mengindikasikan bahwa penduduk yang mencari pekerjaan tinggi, sehingga akan memicu tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT).

TPAK Kabupaten Lebong tahun 2015 mencapai 72,68. Angka itu menggambarkan bahwa dari setiap 100 orang penduduk usia kerja sebanyak 72 orang diantaranya sudah dan siap masuk ke dalam pasar kerja.

Gambar 7.1 TPAK Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Lebong, 2013-2015



Sumber: BPS, Sakernas 2015

Secara teoritis TPAK laki-laki akan selalu lebih tinggi dari TPAK perempuan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kedudukan laki-laki sebagai kepala rumahtangga dan sekaligus sebagai tulang punggung dalam membiayai kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu laki-laki dianggap sebagai pencari kerja utama sedangkan perempuan kegiatannya hanya mengurus

rumah tangga. Pada tahun 2015 TPAK laki-laki sebesar 86,87 dan TPAK perempuan sebesar 57,90.

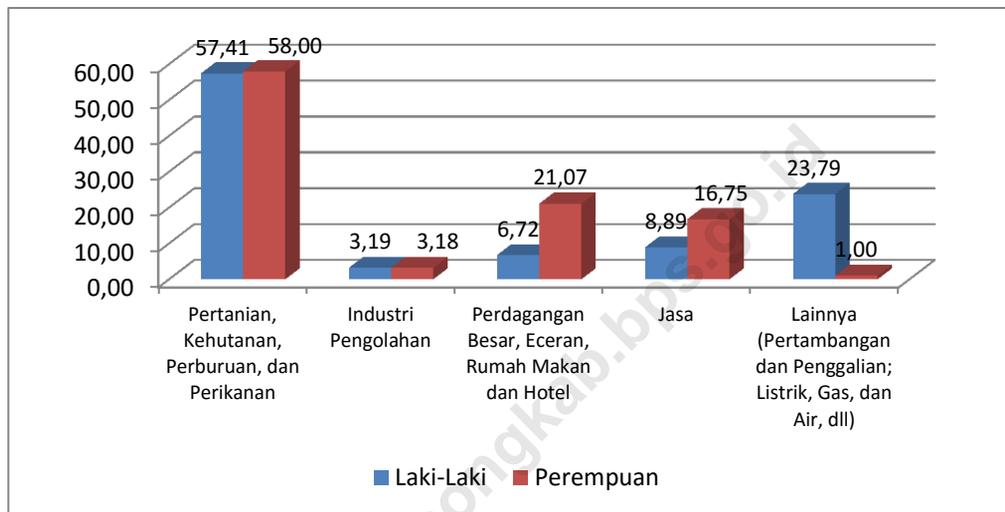
7.2 Penduduk yang Bekerja

Kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Lebong tahun 2015 relatif tinggi mencapai 93,19 persen. Berarti, dari setiap 100 orang angkatan kerja yang ada sebanyak 93 orang telah bekerja atau terserap dalam lapangan pekerjaan.

Pada tahun 2015, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja lebih banyak mendominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan yaitu mencapai 57,64 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan masih menjadi andalan mata pencaharian penduduk Kabupaten Lebong. Masih relatif rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang bekerja di Kabupaten Lebong diduga menjadi salah satu penyebab belum berkembangnya lapangan usaha modern di wilayah ini.

Sedangkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di lapangan usaha industri pengolahan hanya sekitar 3,19 persen. Lapangan usaha lainnya yang relatif banyak menyerap tenaga kerja adalah perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebesar 12,19 persen; jasa sebesar 11,88 persen dan lainnya (pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, dll) sebesar 15,10 persen.

Gambar 7.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha di Kabupaten Lebong, 2015



Sumber: BPS, Sakernas 2015

Lapangan usaha perdagangan di Kabupaten Lebong umumnya bersifat informal seperti warung-warung kecil di rumah-rumah. Perdagangan semacam ini melibatkan hampir semua anggota rumah tangga sebagai pekerja dengan status pekerja tak dibayar. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan; serta lapangan usaha perdagangan merupakan lapangan usaha yang paling mudah bagi masyarakat untuk lepas dari status penganggur. Kedua lapangan usaha ini menjadi "katup pengaman" dalam menanggulangi tingkat penganggur terbuka.

7.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

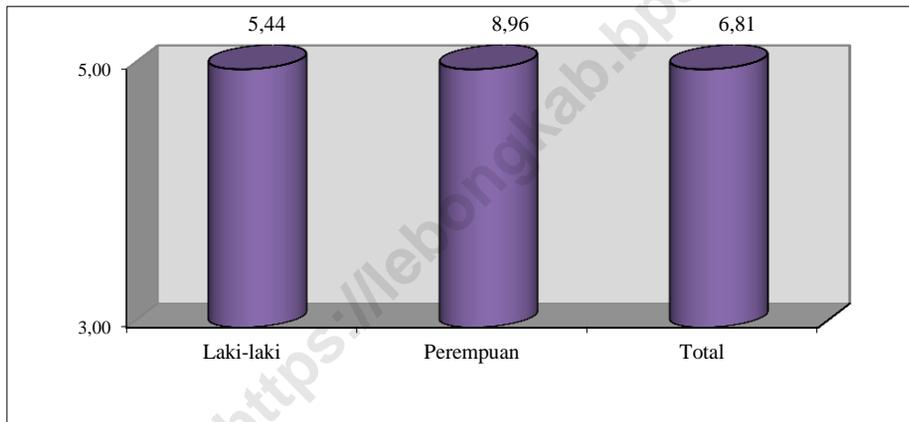
Pencari kerja yang belum terserap dalam lapangan pekerjaan disebut penganggur. Besaran yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Penganggur terdiri dari: mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja (*jobless*).

Penganggur adalah indikator penting dalam pembangunan. Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak negatif bagi perekonomian maupun kehidupan sosial di tingkat nasional maupun regional. Salah satu dampak dari tingginya pengangguran yaitu beban penduduk yang bekerja untuk menanggung hidup para penganggur semakin berat. Pengangguran akan mengurangi potensi penduduk usia kerja untuk menanggung hidup penduduk yang bukan usia kerja (0-14 tahun dan 65+). Angka rasio ketergantungan yang seperti itu akan menggambarkan suatu keadaan beban ketergantungan yang semu. Sebab, penduduk usia kerja yang menganggur atau tidak memiliki penghasilan untuk menopang penduduk bukan usia kerja. Upaya membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya adalah salah satu jalan keluar untuk menurunkan angka pengangguran.

Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lebong diperkirakan sebesar 6,81 persen. Angka tersebut mengungkapkan bahwa untuk setiap 100 orang

penduduk angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau menganggur sebanyak 7 orang. Ditinjau dari jenis kelamin, angka pengangguran penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Pada tahun 2015 TPT penduduk perempuan diperkirakan sebesar 8,96 persen, sedangkan TPT penduduk laki-laki sebesar 5,44 persen.

Gambar 7.3 TPT Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong, 2015



Sumber: BPS, Sakernas 2015

Salah satu cara untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan atau berwiraswasta. Selama para pencari kerja masih berharap untuk mendapatkan kerja dari suatu perusahaan atau institusi, pengangguran akan tetap menjadi masalah pelik. Masalah pengangguran akan terpecahkan bila muncul keinginan untuk menciptakan lapangan usaha sendiri atau berwiraswasta.

BAB VIII

KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

8.1 Peristiwa Kejahatan

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di suatu daerah dapat tergambarkan dari banyaknya peristiwa kriminal atau kejahatan yang terjadi di daerah tersebut. Peristiwa kriminal atau kejahatan yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat pada umumnya dipengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, seperti: tingkat pengangguran yang tinggi, rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk, tingginya angka kemiskinan, tingginya ketimpangan antara penduduk yang kaya dan miskin, dan lain-lain.

Pada kurun waktu 2014-2016 peristiwa kejahatan yang dilaporkan masyarakat kepada kepolisian mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 peristiwa kejahatan yang dilaporkan sebanyak 70 kejadian, meningkat menjadi 85 kejadian pada tahun 2016, atau meningkat sebesar 21,43 persen.

Respon kepolisian dalam menyelesaikan peristiwa-peristiwa kejahatan yang dilaporkan masyarakat pada tahun 2016 cukup optimal. Hal itu tergambar dari tingginya tingkat penyelesaian peristiwa kejahatan yang dilaporkan. Dari 80 peristiwa kejahatan yang dilaporkan masyarakat kepada kepolisian pada tahun 2016, yang berhasil diselesaikan sebanyak 76 kasus atau 89,41 persen. Penyelesaian peristiwa kejahatan yang dilaporkan masyarakat pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana dari 63 peristiwa kejahatan yang

dilaporkan tahun 2015 yang berhasil diselesaikan sebanyak 41 kasus atau 65,08 persen.

Tabel 8.1 Banyaknya Peristiwa Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Kabupaten Lebong, 2014-2016

Jenis Kejahatan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	9	10	13
02. Penganiayaan Ringan	12	16	11
03. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	4	3	11
04. Perkosaan	6	7	8
05. Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	5	3	7
06. Pencabulan	-	-	4
07. Pencurian dengan Pemberatan (Curat)	6	-	4
08. Penipuan/Perbuatan Curang	1	2	3
09. Pembunuhan	-	-	1
10. Lainnya (Penganiayaan Berat, Pencurian dengan Kekerasan, Penggelapan, dan Korupsi)	14	9	-

Sumber: Polres Kabupaten Lebong

Jenis peristiwa kejahatan yang banyak terjadi di Kabupaten Lebong tahun 2016 yaitu peristiwa pencurian biasa sebanyak 13 kasus atau 20,97 persen dari keseluruhan kasus kejahatan.

BAB IX PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Papan atau rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, selain pangan dan sandang. Rumah berfungsi sebagai tempat individu maupun keluarga untuk berlindung dari panas matahari, hujan dan ancaman keamanan dari lingkungan sekitarnya. Dalam fungsi yang lebih luas rumah sebagai tempat proses awal untuk bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat.

Keadaan atau kondisi rumah dapat mencerminkan kualitas kehidupan khususnya kualitas kesehatan dan tingkat kesejahteraan rumahtangga atau keluarga yang menempatinnya. Selain itu, kondisi dan kualitas rumah yang didiami masyarakat dapat menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah atau tempat tinggal yang layak bagi penduduknya.

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat, permintaan rumah atau tempat tinggal dengan kualitas yang baik serta memenuhi standar kehidupan yang layak akan terus mengalami peningkatan. Rumah atau tempat tinggal yang layak huni harus memenuhi persyaratan kesehatan, diantaranya: sanitasi lingkungan, fasilitas sumber air bersih, tempat pembuangan tinja, fasilitas penerangan, bebas polusi serta keamanan.

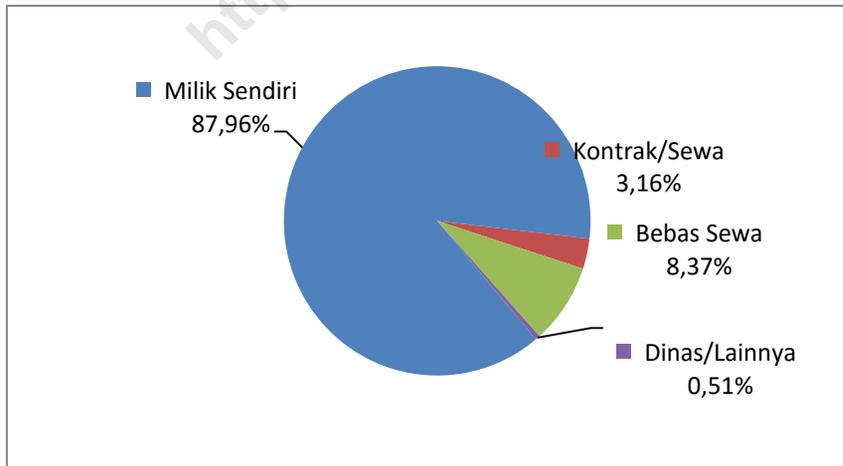
9.1 Status Penguasaan Tempat Tinggal

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang perumahan

adalah terpenuhinya kebutuhan pokok penduduk akan perumahan. Keberhasilan pembangunan di bidang perumahan juga dapat digambarkan dari semakin banyaknya penduduk atau rumahtangga dengan status penguasaan rumah atau tempat tinggal milik sendiri. Di samping itu penguasaan rumah dengan status milik sendiri juga dapat menggambarkan status sosial masyarakat.

Hingga tahun 2016 persentase rumahtangga yang penguasaan rumah atau tempat tinggal dengan status milik sendiri di Kabupaten Lebong tergolong tinggi mencapai 87,96 persen. Sementara, penguasaan rumah dengan status kontrak/sewa sebesar 3,16 persen, sementara bebas sewa sebesar 8,37 persen, dinas dan lainnya sebesar 0,51 persen.

Gambar 9.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Rumah/Tempat Tinggal yang Didiami di Kabupaten Lebong, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

Tingginya persentase rumahtangga yang menguasai rumah dengan status milik sendiri mengungkapkan bahwa pemenuhan kebutuhan perumahan di Kabupaten Lebong telah cukup berhasil. Kondisi itu juga mengungkapkan bahwa sebagian besar rumahtangga di Kabupaten Lebong tidak lagi dibebani biaya pengeluaran untuk sewa rumah. Sehingga peluang penduduk di daerah ini untuk meningkatkan taraf kehidupannya sangat terbuka lebar.

9.2 Kualitas dan Fasilitas Rumah dan Tempat Tinggal

Kelayakan rumah dan tempat tinggal yang dihuni individu atau rumahtangga dapat diukur dari kualitas dan kelengkapan fasilitas rumah dan tempat tinggal yang dimiliki. Semakin baik kualitas dan semakin lengkap fasilitas rumah dan tempat tinggal yang dimiliki maka tingkat kelayakan huni rumah dan tempat tinggal dikategorikan semakin baik. Kualitas dan kelengkapan fasilitas rumah dan tempat tinggal dapat dilihat dari: luas lantai selain tanah, jenis atap, jenis dinding, sumber penerangan, tempat pembuangan tinja, sumber air minum dan lain-lain.

Di Kabupaten Lebong, kelayakan rumah dan tempat tinggal tidak bisa dilihat dari kualitas atap, karena mayoritas penduduk menggunakan seng sebagai atap rumah bukan sebagai pilihan. Namun, mempertimbangkan keadaan Kabupaten Lebong, dalam lingkup luas Provinsi Bengkulu yang sering terjadi gempa bumi, dan seng dianggap sebagai atap terbaik. Sebanyak 95,87 persen penduduk menggunakan seng, 1,58 persen yang menggunakan asbes, dan hanya 1,54 persen

yang menggunakan genteng dan bambu/kayu/sirap sebagai atap rumah.

Ditinjau dari luas lantai selain tanah, dinding, dan atap, kualitas rumah dan tempat tinggal yang dihuni sebagian besar penduduk di Kabupaten Lebong sudah cukup layak. Hal tersebut terlihat dari tingginya persentase rumah dan tempat tinggal yang luas lantai selain tanah, dan dindingnya selain bambu/anyaman bambu serta atapnya beton/genteng/asbes/seng.

Persentase rumahtangga dengan lantai rumah atau tempat tinggal yang dihuni selain tanah mencapai 98,40 persen, persentase rumahtangga dengan dinding rumah atau tempat tinggal terbuat dari selain bambu/anyaman bambu sebesar 96,32 persen, dan persentase rumahtangga dengan atap rumah atau tempat tinggal terbuat dari beton/genteng/asbes/seng sebesar 99,68 persen.

Tabel 9.1. Persentase Rumah dan Tempat Tinggal Menurut Jenis Lantai, Atap, dan Dinding di Kabupaten Lebong, 2016

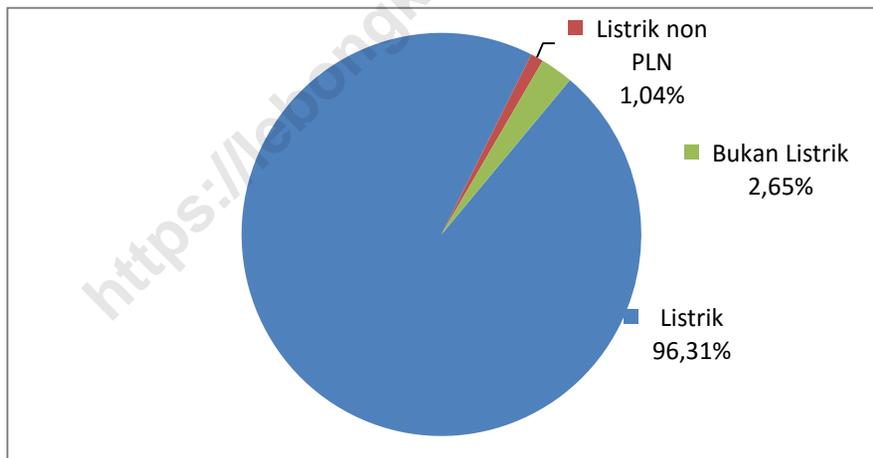
Rincian	Persentase
(1)	(2)
1. Lantai Selain Tanah	98,40
2. Atap Selain Bambu/Kayu/Sirap;ljuk/Rumbia	96,32
3. Dinding Selain Bambu/Anyaman Bambu	99,68

Sumber: BPS, Susenas 2016

Demikian pula halnya bila ditinjau dari fasilitas atau kelengkapan rumah atau tempat tinggal yang dihuni, maka ketersediaan fasilitas atau kelengkapan rumah dan tempat tinggal

yang dimiliki sudah cukup memadai. Kondisi tersebut terlihat dari tingginya persentase rumahtangga yang rumah dan tempat tinggalnya mempunyai sumber penerangan utama listrik dan menggunakan sumber air minum berasal dari sumur, ledeng, air dalam kemasan, dan sumur bor. Sumber air minum yang memenuhi kriteria kesehatan adalah air minum yang tidak mengandung partikel yang berbahaya, tidak berwarna, tidak berbau dan terhindar dari pencemaran lingkungan sekitarnya.

Gambar 9.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Lebong, 2016

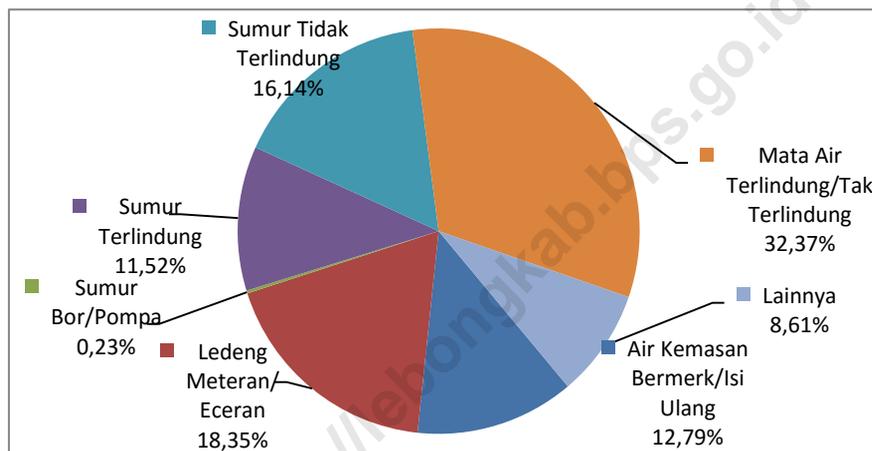


Sumber: BPS, Susenas 2016

Tahun 2016 persentase rumah atau tempat tinggal yang dihuni rumahtangga dengan sumber penerangan utamanya listrik mencapai 96,31 persen. Persentase rumahtangga yang menggunakan air minum bersumber dari air kemasan, air ledeng, sumur bor, sumur, dan mata air terlindung/tidak terlindung

mencapai 91,39 persen. Sedangkan persentase rumahtangga yang sumber air minumannya berasal dari air permukaan, air hujan, dan lainnya cukup rendah yakni sebesar 8,61 persen.

Gambar 9.3 Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Lebong, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

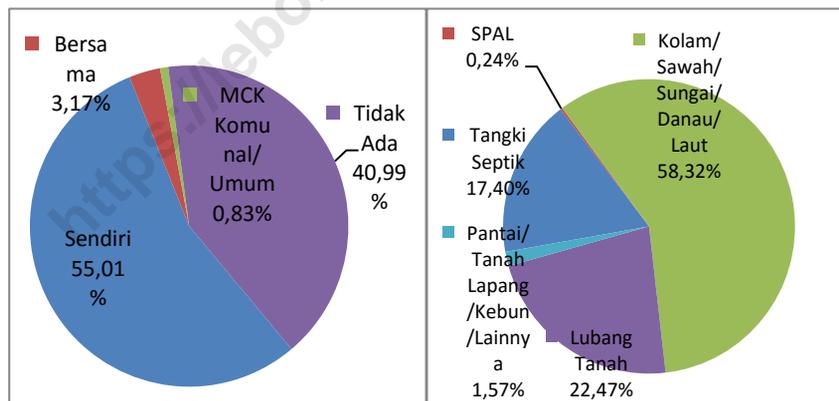
Kondisi lingkungan sangat ditentukan oleh sistem sanitasi rumah. Hal ini erat kaitannya dengan resiko penularan penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Aspek kepemilikan terhadap fasilitas buang air besar berpengaruh terhadap pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Pada tahun 2016, mayoritas rumah tangga memiliki sendiri fasilitas buang air besar yaitu 54,83 persen. Artinya hanya digunakan oleh anggota rumah tangga, sehingga kebersihan dilakukan sendiri oleh rumah tangga itu sendiri. Bersih dan kotor, sehat dan sakit menjadi pilihan rumah tangga tersebut.

Namun, masih ada 40,86 persen penduduk yang tidak punya fasilitas tempat buang air besar. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan lingkungan. Persentase rumah tangga dengan ketiadaan fasilitas tempat buang air besar ini adalah yang paling besar di antara Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bengkulu.

Salah satu program yang mampu mengurangi angka ketiadaan fasilitas tempat buang air besar yaitu MCK Komunal/umum. Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas umum/MCK komunal sebanyak 0,83 persen.

Gambar 9.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Lebong, 2016



Sumber: BPS, Susenas 2016

Tangki septik belum banyak digunakan sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Masyarakat masih biasa menggunakan kolam/sawah/sungai/danau/laut dan lubang tanah sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Hanya 17,40 persen penduduk yang menggunakan tangki septik. Sebanyak 22,47 persen rumah

tangga menggunakan lubang tanah. Bahkan mayoritas rumah tangga yang menggunakan kolam/sawah/sungai/danau/laut dan pantai/ tanah lapang/kebun/lainnya sebagai tempat pembuangan akhir tinja anggota rumah tangga sebanyak 58,32 persen. Pengetahuan mengenai tempat pembuangan akhir tinja/ sistem sanitasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sehingga lingkungan sehat menjadi milik masyarakat.

<https://lebongkab.bps.go.id>

BAB X PENUTUP

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu memperhatikan pengendalian kuantitas penduduk yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidup penduduk. Dari uraian publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lebong tahun 2016, diketahui bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lebong tahun 2012-2016 yaitu sebesar 1,97 persen per tahun. Angka ini diatas angka pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu yang hanya sebesar 1,80 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk bisa mengendalikan jumlah penduduk masih cukup berat.

Penambahan penduduk yang terjadi seharusnya diikuti pula dengan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya, agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yaitu dengan peningkatan kualitas pendidikan penduduknya.

Di bidang pendidikan, keberhasilan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk dapat dilihat dari perkembangan berbagai indikator. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan salah satu indikator yang memberikan informasi mengenai perkembangan program pemerintah dalam dalam memberantas buta huruf. AMH penduduk umur 10 tahun ke atas di Kabupaten Lebong tahun 2016 telah mencapai 98,96 persen. Tingginya AMH menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Lebong telah mampu untuk membaca dan menulis.

Meskipun demikian, masih ada 1,04 persen yang tidak bisa membaca dan menulis. Namun, bila dilihat dari indikator lainnya, seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), terdapat suatu informasi yang menunjukkan semakin menurunnya partisipasi sekolah pada kelompok umur yang lebih tinggi.

Indikator lainnya seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menunjukkan perkembangan yang positif. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2016 di Kabupaten Lebong adalah 7,86 tahun, sedangkan angka harapan lama sekolahnya telah mencapai 12,15 tahun. Angka harapan lama sekolah mewakili indikator proses pendidikan, sementara angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran atau indikasi pada output pendidikan. Jika dihubungkan dengan program wajib belajar pemerintah sembilan tahun, dapat terlihat bahwa belum semua penduduk dapat mengenyam pendidikan formal seperti yang diwajibkan. Meskipun demikian, telah terlihat ada perkembangan dari sisi prosesnya, yang diharapkan kedepannya akan dapat mencapai di atas lama tahun wajib belajar.

Disamping pendidikan, yang juga perlu mendapat perhatian adalah tingkat kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai indikasi perkembangan pembangunan di bidang kesehatan secara umum. Dalam hal ini, AHH di Kabupaten Lebong terlihat terus menunjukkan peningkatan. AHH Kabupaten Lebong tahun 2016 mencapai 62,39 tahun.

Tingkat kesehatan dan pendidikan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Lebong. Indikator lain yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi perencanaan pembangunan adalah indikator mengenai tingkat kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lebong tahun 2016 mencapai 13,560 ribu jiwa (kondisi September) atau sebesar 12,26 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Lebong. Jika dibandingkan dengan kondisi September tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lebong mengalami peningkatan. Namun, jika dilihat dari persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini tentunya merupakan suatu kondisi yang perlu untuk menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi program pembangunan yang telah dilaksanakan dan untuk perencanaan kedepannya.

Secara umum, berbagai informasi yang disajikan pada publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran bagi berbagai pihak mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebong, terutama dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan dengan informasi dan data yang memadai diharapkan dapat menjadi semakin baik dan 'mengena' ke seluruh lapisan masyarakat.

Lampiran

<https://lebongkakans.go.id>



II. KEPENDUDUKAN

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong, 2016

Kecamatan	Penduduk		Luas Wilayah		Kepadatan Penduduk
	Jumlah	%	Km	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rimbo Pengadang	5.016	4,5	85,71	5,15	58,5
Topos	6.340	5,7	344,28	20,67	18,4
Lebong Selatan	15.223	13,7	211,69	12,71	71,9
Bingin Kuning	10.711	9,6	86,89	5,22	123,3
Lebong Tengah	11.004	9,9	70,97	4,26	155,1
Lebong Sakti	9.386	8,5	88,69	5,33	105,9
Lebong Atas	5.361	4,8	36,00	2,16	149,0
Padang Bano	5.348	4,8	-	-	-
Pelabai	7.467	6,7	40,71	2,44	183,5
Lebong Utara	16.934	15,2	32,10	1,93	527,8
Amen	7.843	7,1	17,28	1,04	453,9
Uram Jaya	5.583	5,0	42,95	2,58	130,0
Pinang Belapis	4.847	4,4	608,01	36,51	8,0
Jumlah	111.063	100	1.665,28	100	66,7

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lebong dan Provinsi Bengkulu, 2012-2016

Tahun	Kabupaten Lebong		Provinsi Bengkulu	
	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	103.505	2,73	1.766.794	1,42
2013	105.421	1,85	1.814.357	2,69
2014	107.296	1,78	1.844.788	1,68
2015	109.190	1,77	1.874.944	1,63
2016	111.063	1,72	1.904.793	1,59

Sumber: BPS Kabupaten Lebong, Kabupaten Lebong Dalam Angka 2017

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebong, 2016

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rimbo Pengadang	2.578	2.438	5.016	105
Topos	3.203	3.137	6.340	102
Lebong Selatan	7.784	7.439	15.223	104
Bingin Kuning	5.410	5.301	10.711	102
Lebong Tengah	5.579	5.425	11.004	102
Lebong Sakti	4.720	4.666	9.386	101
Lebong Atas	2.756	2.605	5.361	105
Padang Bano	2.954	2.394	5.348	123
Pelabai	3.837	3.630	7.467	105
Lebong Utara	8.549	8.385	16.934	101
Amen	3.972	3.871	7.843	102
Uram Jaya	2.788	2.795	5.583	99
Pinang Belapis	2.544	2.303	4.847	110
Jumlah	56.674	54.389	111.063	104

Sumber: BPS Kabupaten Lebong, Kabupaten Lebong Dalam Angka 2017

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong, 2016

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	5.194	5.064	10.258
5-9	5.542	5.176	10.718
10-14	5.315	5.171	10.486
15-19	5.054	4.673	9.727
20-24	4.758	4.352	9.110
25-29	5.001	4.759	9.760
30-34	4.558	4.574	9.162
35-39	4.771	4.420	9.191
40-44	3.866	3.859	7.725
45-49	3.476	3.270	6.746
50-54	3.109	2.809	5.918
55-59	2.268	2.078	4.346
60-64	1.503	1.388	2.891
65-69	943	940	1.883
70-74	649	837	1.486
75+	637	1.019	1.656
Jumlah	56.674	54.389	111.063

Sumber: BPS Kabupaten Lebong, Kabupaten Lebong Dalam Angka 2017

Tabel 2.5 Persentase Penduduk Wanita Berumur 15-48 Tahun ke Atas dan Berstatus Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Lebong, 2016

Status Penggunaan Alat/Cara KB	Persentase
(1)	(2)
Pernah	8,71
Sedang	64,90
Tidak Menggunakan	26,39
Jumlah	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

III. PENDIDIKAN

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Lebong, 2016

Kemampuan Baca Tulis	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Huruf Latin	99,19	97,48	98,36
Huruf Arab	36,22	34,81	35,53
Huruf Lainnya	1,25	0,70	0,98
Buta Huruf	0,36	1,76	1,04

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 3.2 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Terhadap Sekolah dan Guru Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Lebong, Tahun Ajaran 2013/2014 – 2016/2017

Tahun	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Terhadap	
				Sekolah	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013/2014	98	12.375	728	126,28	17,00
2014/2015	98	11.579	1063	118,15	10,89
2015/2016	99	11.908	1129	120,28	10,55
2016/2017	99	11.339	935	114,54	12,13

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong

Tabel 3.3 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Terhadap Sekolah dan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Lebong, Tahun Ajaran 2013/2014 – 2016/2017

Tahun	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Terhadap	
				Sekolah	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013/2014	24	4.937	356	205,71	13,87
2014/2015	24	5.062	476	210,92	10,63
2015/2016	24	5.259	477	219,13	11,03
2016/2017	24	5.062	482	210,92	10,50

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong

Tabel 3.4 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid Terhadap Sekolah dan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Lebong, Tahun Ajaran 2013/2014 – 2016/2017

Tahun	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid Terhadap	
				Sekolah	Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013/2014	7	2.009	183	287,00	10,98
2014/2015	7	2.015	172	287,86	11,72
2015/2016	7	2.106	170	300,86	12,39
2016/2017	7	2.087	170	298,14	12,28

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebong

III. KESEHATAN

Tabel 4.1 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Jumlah Hari Sakit dan Rata-Rata Lama Sakit di Kabupaten Lebong, 2016

Jumlah Hari Sakit (Hari)	Persentase
(1)	(2)
≤3	45,09
4-7	36,74
8-14	5,12
15-21	5,74
22 – 30	7,30
Jumlah	100,00
Rata-Rata Lama Sakit (Hari)	6,86

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 4.2 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Selama Setahun Terakhir Menurut Tempat Rawat Inap di Kabupaten Lebong, 2016

Tempat Rawat Inap	Persentase
(1)	(2)
Rumah Sakit Pemerintah	89,69
Rumah Sakit Swasta	6,54
Praktek Dokter/Bidan	7,23
Klinik/Praktek Dokter Bersama	0,00
Puskesmas/Pustu	3,38
Praktek Pengobatan Tradisional	3,29
Jumlah	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 4.3 Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Bengkulu, 2016

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Bengkulu Selatan	64,49	70,22	67,25
Rejang Lebong	68,07	62,58	65,54
Bengkulu Utara	46,65	45,65	45,65
Kaur	23,10	36,16	29,27
Seluma	43,25	67,66	56,02
Muko-Muko	60,58	53,54	57,40
Lebong	41,65	37,67	40,01
Kepahiang	65,85	58,85	62,48
Bengkulu Tengah	55,75	48,93	52,51
Kota Bengkulu	64,83	50,36	58,43
Bengkulu	55,46	54,27	54,91

Sumber: BPS, Susenas 2016

VI. POLA KONSUMSI DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Tabel 6.1 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang di Kabupaten Lebong (Rupiah), 2016

Kelompok Barang	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan (Rupiah)
(1)	(2)
Makanan	507.274
Non Makanan	314.043
Jumlah	821.317

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 6.2 Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Lebong, 2016

Kelompok Makanan	Rata-Rata Pengeluaran (Rupiah)	Persentase Rata-Rata Pengeluaran (%)
(1)	(2)	(3)
Padi-Padian	89.364	17,62
Umbi-Umbian	4.148	0,82
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	45.510	8,97
Daging	14.584	2,87
Telur dan Susu	19.962	3,94
Sayur-Sayuran	54.465	11,13
Kacang-Kacangan	7.751	1,53
Buah-Buahan	23.951	4,72
Minyak dan Lemak	15.751	3,10
Bahan Minuman	19.479	3,84
Bumbu-Bumbuan	7.731	1,52
Konsumsi Lainnya	7.393	1,46
Makanan Jadi	96.970	19,12
Tembakau dan Sirih	98.215	19,36
Jumlah	507.274	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 6.3 Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Lebong, 2016

Kelompok Bukan Makanan	Rata-Rata Pengeluaran (Rupiah)	Persentase Rata-Rata Pengeluaran (%)
(1)	(2)	(3)
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	167.241	53,25
Aneka Barang dan Jasa	73.772	23,49
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	26.264	8,36
Barang yang Tahan Lama	29.507	9,40
Pajak, Pungutan dan Asuransi	8.711	2,77
Keperluan Pesta dan Upacara	8.548	2,73
Jumlah	314.043	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

VII. KETENAGAKERJAAN

Tabel 7.1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Lebong, 2013-2015

Kegiatan Utama	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	49.668	54.708	57.584
Bekerja	46.480	52.754	53.661
Pengangguran Terbuka	3.188	1.954	3.923
Bukan Angkatan Kerja	23.646	22.730	21.647
Sekolah	3.027	6.277	6.164
Mengurus Rumah Tangga	16.289	13.852	13.271
Lainnya	4.330	2.602	2.212
Jumlah	73.314	77.438	79.231
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,75	70,65	72,68

Sumber: BPS, Sakernas

Tabel 7.2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong, 2015

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	35.119	22.465	57.584
Bekerja	33208	20.453	53.661
Pengangguran Terbuka	1.911	2.012	3.923
Bukan Angkatan Kerja			
	5.309	16.338	21.647
Sekolah	3.383	2.781	6.164
Mengurus Rumah Tangga	379	12.892	13.271
Lainnya	1.547	665	2.212
Jumlah	40.428	38.803	79.231
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	86,87	57,89	72,68
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,44	8,96	6,81

Sumber: BPS, Sakernas 2015

Tabel 7.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong, 2015

Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	19.065	11.863	30.928
Industri Pengolahan	1.060	650	1.710
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	2.231	4.310	6.541
Jasa	2.951	3.426	6.377
Lainnya (Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas, dan Air; dll)	7.901	204	8.105
Jumlah	33.208	20.453	53.661

Sumber: BPS, Sakernas 2015

VIII. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Tabel 8.1 Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Dilaporkan dan yang Diselesaikan di Kabupaten Lebong, 2014-2016

Tahun	Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Dilaporkan	Jumlah Peristiwa Kejahatan Diselesaikan
(1)	(2)	(3)
2014	70	30
2015	63	41
2016	85	76

Sumber: Polisi Resort (Polres) Kabupaten Lebong

IX. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Tabel 9.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kabupaten Lebong, 2016

Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati	Persentase
(1)	(2)
Milik Sendiri	87,96
Kontrak/Sewa	3,16
Bebas Sewa	8,37
Dinas/Lainnya	0,51
Jumlah	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 9.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas di Kabupaten Lebong, 2016

Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas	Persentase
(1)	(2)
Beton	0,00
Genteng	1,22
Asbes	1,58
Seng	96,87
Bambu/Kayu/Sirap	0,42
Jerami/Ijuk/Daun/Rumbia	0,00
Lainnya	0,00
Jumlah	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 9.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Dinding Terluas di Kabupaten Lebong, 2016

Bahan Bangunan Utama Dinding Terluas	Persentase
(1)	(2)
Tembok	16,09
Plasteran Anyaman Bambu/Kawat	43,02
Kayu/Batang Kayu	36,85
Bambu/Anyaman Bambu	3,68
Lainnya	0,37
Jumlah	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 9.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bangunan Utama Lantai Terluas di Kabupaten Lebong, 2016

Bahan Bangunan Utama Lantai Terluas	Persentase
(1)	(2)
Marmer/Granit	0,00
Keramik	28,97
Parket/ Vinil / Permadani / Ubin / Tegel / Teraso	0,29
Kayu/Papan Kualitas Tinggi	8,67
Semen/Bata Merah	42,85
Bambu/Kayu/Papan Kualitas Rendah	18,68
Tanah	0,54
Lainnya	0,00
Jumlah	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 9.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Lebong, 2016

Sumber Penerangan Utama	Persentase
(1)	(2)
Listrik PLN	96,31
Listrik Non PLN	1,04
Bukan Listrik	2,65
Jumlah	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 9.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum di Kabupaten Lebong, 2016

Sumber Air Utama	Persentase
(1)	(2)
Air Kemasan Bermerk/Isi Ulang	12,79
Ledeng Meteran/Eceran	18,35
Sumur Bor/Pompa	0,23
Sumur Terlindung	11,52
Sumur Tak Terlindung	16,14
Mata Air Terlindung/Tak Terlindung	32,37
Air Permukaan	8,02
Air Hujan	0,37
Lainnya	0,22
Jumlah	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 9.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Lebong, 2016

Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Persentase
(1)	(2)
Sendiri	54,84
Bersama	3,16
Umum/MCK Komunal	0,83
Ada, ART tidak menggunakan	0,32
Tidak Ada	40,86
Jumlah	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

Tabel 9.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Lebong, 2016

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	Persentase
(1)	(2)
Tangki Septik	17,40
SPAL	0,24
Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	58,32
Lubang Tanah	22,47
Pantai/Tanah Lapang/Kebun/Lainnya	1,57
Jumlah	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2016

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://lebonkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LEBONG**

*Jalan Raya Komplek Perkantoran Jalur Dua Tubei
Telp. 0738-2200032*

website: lebonkab.bps.go.id; email: bps1707@bps.go.id

ISBN 978-602-6853-86-8



9 786026 853868 >